



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama wilayah timur Indonesia karena letaknya yang strategis di perbatasan wilayah tengah dan timur Indonesia. Provinsi yang beribukota di Kota Samarinda ini terkenal akan tambang minyak bumi dan batubara serta hasil hutan sejak dulu hingga saat ini. Selain itu, ratusan sungai yang tersebar se-antero Provinsi Kalimantan Timur menjadikan daya tarik tersendiri karena sungai-sungai inilah penghubung utama antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia.

Pada abad ke-4 Masehi di Pulau Kalimantan telah berdiri Kerajaan Kutai (Kutai Martadipura) yang terletak di Muara Kaman, Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah kerajaan Kutai Martadipura mencakup wilayah yang cukup luas, yaitu hampir menguasai seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur bahkan menguasai sebagian wilayah Kalimantan pada masa kejayaannya. Kerajaan yang bercorak Hindu ini memiliki raja pertama bernama Raja Kudungga dan secara turun temurun penggantian raja berasal dari keturunan Raja Kudungga.

Raja terbesar dari Kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman yang merupakan anak dari Raja Aswawarman dan cucu Raja Kudungga. Kerajaan Kutai pada masa pemerintahan Raja Mulawarman mengalami puncak masa kejayaannya yang terlihat pada kehidupan masyarakatnya sejahtera dan diadakannya upacara kurban dengan emas yang sangat banyak. Namun pada masa pemerintahan Maharaja Dhama Setia (raja ke-21), Kerajaan Kutai mengalami keruntuhan.

Sesuai traktat 1 Januari 1817, Sultan Sulaiman dari Banjar menyerahkan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Selatan (termasuk Banjarmasin) kepada Hindia-Belanda. Pada tanggal 4 Mei 1826, Sultan Adam al-Watsiq Billah dari Banjar menegaskan kembali penyerahan wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Selatan kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1846, Belanda mulai menempatkan Asisten Residen di Samarinda untuk wilayah Borneo Timur (sekarang provinsi Kalimantan Timur dan bagian timur Kalimantan Selatan) bernama H. Von Dewall. Provinsi Kalimantan Timur selain sebagai kesatuan administrasi, juga sebagai kesatuan ekologis dan historis. Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah administrasi dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 dengan gubernurnya yang pertama adalah APT Pranoto.

Sebelumnya Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu karesidenan dari Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan aspirasi rakyat, sejak tahun 1956 wilayahnya dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Kondisi geografi dan demografi merupakan dua faktor penting, mendasar dan saling menunjang satu sama lain yang menentukan keberhasilan pembangunan. Kondisi geografi akan memberikan gambaran tentang ketersediaan sumber daya alam, luas lahan, mineral dan bahan tambang yang terkandung di dalamnya, hingga fisiografi lahan beserta flora dan fauna yang berada di atasnya. Sedangkan, kondisi demografi merupakan gambaran tentang ketersediaan sumber daya manusia, baik ditinjau dari aspek kualitas maupun kuantitasnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan.

2.1.1. KARAKTERISTIK WILAYAH

Karakteristik wilayah menjelaskan luas dan batas wilayah administrasi, kondisi geografis, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, kondisi iklim, dan kondisi penggunaan lahan Provinsi Kalimantan Timur.

1) Luas dan batas wilayah administrasi

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas wilayah sekitar 12.726.752 ha yang terdiri dari daratan seluas 12.533.681 ha dan perairan darat seluas 193.071 ha. Sebagai provinsi terluas ketiga, Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah mencapai 6,66 persen dari luas wilayah Indonesia. Dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten (Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu) dan 3 (tiga) kota (Balikpapan, Bontang dan Samarinda).

Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Luas Daratan (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Paser	1.074.526	10	144
2. Kutai Barat	1.537.890	16	194
3. Mahakam Ulu	*1.531.500	5	50
4. Kutai Kartanegara	2.571.641	18	237
5. Kutai Timur	3.173.519	18	135
6. Berau	2.195.171	13	110
7. Penajam Paser Utara	313.195	4	54
8. Balikpapan	50.432	6	34
9. Samarinda	69.496	10	53
10. Bontang	16.311	3	15
Kalimantan Timur	12.533.681	103	1.026

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Timur adalah Kabupaten Kutai Timur dengan luas sebesar 3.173.519 Ha atau 25,32 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan Kabupaten dengan luas terkecil adalah Kabupaten Penajam Paser Utara yang hanya memiliki luas sebesar 313.195 Ha atau 2,50 persen dari total luas

wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk luas wilayah perkotaan, total luas wilayah 3 kota di Provinsi Kalimantan Timur hanya memiliki proporsi wilayah sebesar 1,09 persen saja.

Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

2) Kondisi Geografis

Posisi Provinsi Kalimantan Timur terletak antara $4^{\circ} 24'$ Lintang Utara (LU) dan $2^{\circ} 25'$ Lintang Selatan (LS), $113^{\circ} 44'$ Bujur Timur (BT) dan $119^{\circ} 00'$ Bujur Timur (BT). Geo-strategis Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu dari 13 provinsi di Indonesia yang mempunyai wilayah perbatasan antar negara, yaitu dengan negara Malaysia. Selain itu, posisi Provinsi Kalimantan Timur berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dari Laut Sulawesi ke Samudra Hindia melalui Selat Makasar dan Selat Lombok yang memiliki potensi perekonomian sangat strategis. ALKI berperan dalam memperlancar transportasi kapal-kapal dagang yang melintasi wilayah kepulauan Indonesia. Manfaat dari tersedianya jalur laut tersebut bagi Indonesia sangat besar, yaitu dapat meningkatkan hubungan dagang baik dengan negara-negara Afrika, Asia, dan Pasifik. Bagi Provinsi Kalimantan Timur, posisi ALKI II sangat bernilai strategis baik ditinjau aspek ekonomi maupun politis karena akan membuka peluang berkembangnya pelabuhan besar dan berstandar internasional yang dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah dan nasional.

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur berada di pulau besar Kalimantan yang sangat luas dengan berbagai keanekaragaman karakteristik wilayah seperti kawasan perkotaan, perbatasan, pedalaman, terpencil, pegunungan, pesisir, dan kepulauan. Batas antar negara dengan Malaysia pun langsung lintas darat.

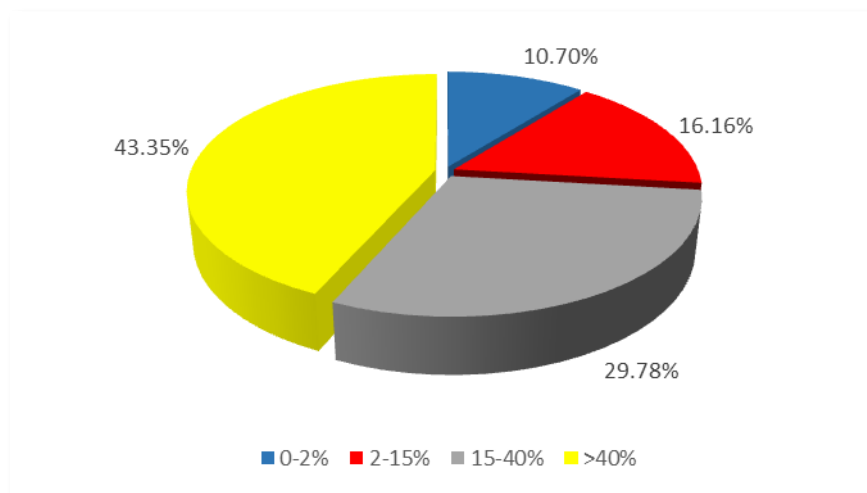
3) Kondisi Topografi

Berdasarkan kelerengan atau kemiringan lahan dan ketinggian tempat, karakteristik topografi Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh lahan-lahan dengan kelerengan di atas 40 persen dan ketinggian kurang dari 500 meter dpl. Kondisi demikian akan mempunyai pengaruh sangat besar dalam rangka pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Lahan datar (0-2%) di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya hanya terdapat di daerah pantai dan daerah aliran sungai-sungai besar yang luasnya sekitar 10,70 persen dari total wilayah. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan landai (2-15%) luasnya mencapai 16,16 persen. Sisanya, lahan berbukit dengan tingkat kelerengan > 15% dengan luasnya mencapai sekitar 73,14 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pengembangan tanaman pangan hanya mungkin dilakukan di daerah yang datar hingga landai atau wilayah dengan kemiringan 0-15 persen. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan yang lebih tinggi (>15 persen) hanya cocok untuk tanaman tahunan dan kawasan konservasi.

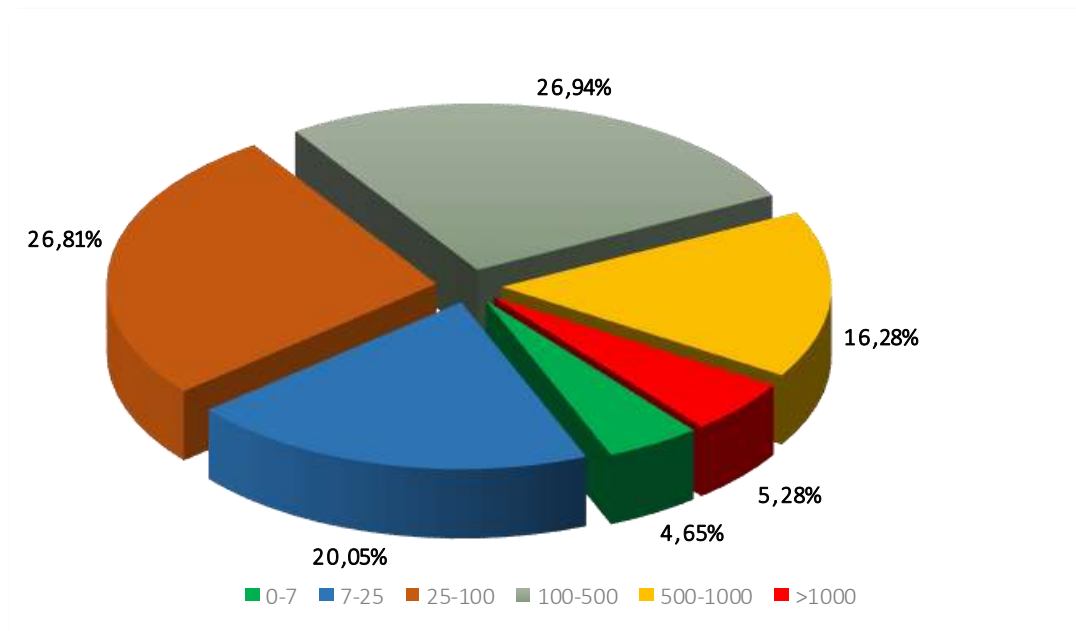
Gambar 2. 1
Karakteristik Topografi Wilayah Berdasarkan Tingkat Kelerengan Lahan
Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013

Berdasarkan ketinggian tempat di atas permukaan laut, 51,51 persen lahan di Provinsi Kalimantan Timur mempunyai ketinggian di bawah 100 mdpl. Sedangkan luas lahan yang terletak pada ketinggian antara 100 dan 500 mdpl mencapai 26,94 persen. Selebihnya terletak pada ketinggian di atas 500 mdpl sekitar 21,55 persen. Berdasarkan data ketinggian tempat tersebut, diketahui bahwa wilayah Provinsi Kalimantan Timur sekitar 21,55 persen termasuk daerah yang berhawa sejuk dengan ketinggian di atas 500 mdpl. Wilayah yang suhunya relatif lebih rendah ini cocok untuk tempat pengembangan tanaman hortikultura, terutama sayuran dan buah-buahan.

Gambar 2. 2
Karakteristik Topografi Wilayah Berdasarkan Ketinggian Tempat (mdpl)
Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013

4) Kondisi Geologi

Jenis tanah di wilayah daratan Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning latosol dan litosol yang tersebar di bagian Tengah dan Utara Provinsi Kalimantan Timur. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah. Jenis tanah ini sesuai untuk usaha pertanian, kebun campuran, pertanian sayur-sayuran, dan hutan.

5) Kondisi Hidrologi

Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 157 sungai besar dan kecil di antaranya adalah Sungai Mahakam yang memiliki panjang 920 km dengan luas Daerah Pengaliran Sungai (DPS) 77.913 km². Terdapat juga Sungai Kelay dengan panjang 254 km. Sedang jumlah danau yang ada sebanyak 18 (delapan belas) buah, dengan 3 (tiga) danau terbesar adalah Danau Melintang seluas 11.000 Ha, Danau Semayang seluas 13.000 Ha dan Danau Jempang seluas 15.000 Ha. Selain dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi dan sumber air baku, sungai-sungai tersebut juga dapat digunakan sebagai Pembangkitan Listrik Tenaga Air (PLTA) seperti Sungai Kelay, Sungai Telen, dan Sungai Medang.

Sesuai dengan Permen PU No. 11 A/PRT/M/2006 tentang Pembagian Wilayah Sungai, sungai-sungai di Provinsi Kalimantan Timur (termasuk Kaltara) dikelompokkan dalam 6 (enam) Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu **SWS Mahakam** (Strategis Nasional) yang terdiri dari Sungai-sungai Besar antara lain Sungai Mahakam, Samboja, Senipah, dan Semoi; **SWS Berau-Kelay** (Lintas Kabupaten) yang terdiri dari sungai-sungai besar antara

lain Sungai Kuning, Bakau, Berau, Pangkung, dan Sungai Pantai; **SWS Karangan** (Lintas Kabupaten) yang terdiri dari sungai-sungai besar antara lain Sungai Karangan, Sangata, Bengalon, dan Santan.

6) Kondisi Iklim

Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Provinsi Kalimantan Timur beriklim tropik dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan/pancaroba pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, karena letaknya di daerah khatulistiwa maka iklim di Provinsi Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat (November-April) dan angin Muson Timur (Mei-Oktober). Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Provinsi Kalimantan Timur kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang.

Suhu udara pada suatu tempat di daerah tropik antara lain ditentukan oleh ketinggian tempat terhadap permukaan laut. Secara umum, Provinsi Kalimantan Timur beriklim tropik dengan suhu udara pada tahun 2013 berkisar dari 20,8°C (Stasiun Meteorologi Tanjung Redeb) sampai dengan 35,6°C (Stasiun Meteorologi Tanjung Redeb). Suhu udara rata-rata terendah adalah 22,1°C dan rata-rata tertinggi adalah 35,1 °C. Status iklim pada tiga stasiun pengamat cuaca secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2
Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Melalui Stasiun Prov. Kalimantan Timur Tahun 2013

Uraian	Stasiun Pengamatan		
	Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Suhu Udara (°C)			
- Minimum	24,6	24,7	22,1
- Maximum	32,2	31,2	35,1
2. Kelembaban Udara (%)	83,0	84,0	87,4
3. Tekanan Udara (mbs)	1.012,0	1.010,0	1.012,6
4. Kecepatan Angin (Knot)	3,0	4,0	4,0
5. Curah Hujan bulanan (mm)	237,8	242,2	245,1
6. Penyinaran Matahari (%)	42,0	47	54,0

Sumber: BMKG Samarinda

Selain itu, sebagai daerah beriklim tropik dengan habitat hutan yang sangat luas, Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kelembaban udara relatif tinggi, dengan rata-rata pada pencatatan selama tahun 2012 berkisar antara 83-87 persen.

Keadaan angin di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 yang dipantau di beberapa stasiun pengamat, menunjukkan bahwa kecepatan angin rata-rata berkisar antara 3-4 knot. Kecepatan angin paling tinggi 6 knot terjadi di Kota Balikpapan, sedangkan terendah 3 knot terjadi di Kabupaten Berau, Kota Samarinda dan Balikpapan.

Tabel 2.3
Data Curah Hujan Tahun 2008 - 2013

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kutai Timur	-	-	1363,0	2058,5	1114,0	1597,0
Kutai Barat	-	6913,0	5759,0	5532,0	7488,0	7885,0
Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-
Penajam Paser Utara	-	-	-	1569,0	1989,0	1827,0
Paser	2718,0	2070,0	3031,0	2067,0	1876,0	2696,0
Berau	2775,4	2489,7	25662,3	2166,6	2439,8	2909,9
Balikpapan	3733,4	2190,9	2833,0	2795,0	2886,0	2865,4
Samarinda	2757,5	2163,2	2444,2	2450,4	2437,0	2863,1
Bontang	2634,0	2135,0	2972,0	2328,0	1900,0	1966,1
Kukar	2836,0	2045,5	1862,3	2037,5	1837,0	2494

Sumber: BMKG Samarinda

Curah hujan bulanan di daerah Provinsi Kalimantan Timur sangat beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Rata-rata curah hujan menurut masing-masing stasiun pengamat selama tahun 2008-2013 yang terendah di Kabupaten Kutai Timur dan yang tertinggi dicatat di Balikpapan dan Berau.

7) Kondisi Penggunaan Lahan

Sumber daya lahan di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (termasuk Kalimantan Utara) Tahun 2011-2031 seluas 19.550.550,99 ha, secara garis besar terbagi menjadi kawasan budidaya kehutanan (KBK) dan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). Kawasan budidaya kehutanan (KBK) mencakup luasan 12.920.647,89 ha (65,83%) yang terbagi menjadi kawasan hutan lindung seluas 5.136.913,99 ha (26,27%) dan kawasan hutan budidaya seluas 7.783.733,90 ha (39,56%). Sedangkan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) memiliki luas 6.629.903,10 ha.

2.1.2. POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, Provinsi Kalimantan Timur diidentifikasi memiliki wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Sebagai dasar dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan daerah, penataan ruang nasional telah mengatur pembentukan kawasan untuk meningkatkan ekonomi pada pusat pertumbuhan yaitu dengan Kawasan Andalan. Kawasan andalan merupakan bagian dari kawasan budidaya yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan disekitarnya. Kawasan Andalan Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan sekitarnya.
2. Kawasan Andalan Sangkulirang – Sengatta - Muara Wahau (SASAMAWA).
3. Kawasan Andalan Bontang – Samarinda – Tenggarong – Balikpapan – Penajam dan sekitarnya (BONSAMTEBAJAM) dan sekitarnya.
4. Kawasan Andalan Laut Bontang – Tarakan dan sekitarnya.

Dalam mendukung kebijakan nasional, tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi namun juga pengembangan wilayah dengan mendukung fungsi lingkungan. Secara berkelanjutan, pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi telah ditetapkan kawasan strategis provinsi dengan melihat nilai strategis penting dalam lingkup wilayah provinsi serta potensi dan pengaruh terhadap daerah sekitarnya, yaitu:

- 1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi meliputi:
 1. Kawasan industri dan Pelabuhan Maloy di kabupaten Kutai Timur;
 2. Kawasan agropolitan regional di kabupaten Kutai Timur; dan
 3. Kawasan pusat pertambangan regional (klaster pertambangan) di kabupaten Kutai Timur.
- 2) Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal provinsi terdapat di Kabupaten Kutai Barat.
- 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi meliputi:
 1. Koridor Sungai Mahakam hingga ke hulu;
 2. Museum Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, dan Bukit Bangkirai di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 3. Desa budaya Pampang di Kota Samarinda.
- 4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi meliputi:
 1. Kawasan Delta Mahakam;
 2. Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, Danau Siran, dan sekitarnya;
 3. Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan); dan
 4. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.

2.1.3. WILAYAH RAWAN BENCANA

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik, gempa vulkanik dan sebagainya.

Tabel 2.4
Jumlah Kejadian Bencana Per Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

Kabupaten/ Kota	Jenis Bencana					
	Kebakaran	Tanah Longsor	Banjir	Angin Topan	Konflik	Tenggelam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)
1.Paser	28	1	9	4	1	2
2.Kutai Barat+Mahakam Ulu	8	-	6	1	-	5
3.Kutai Kartanegara	26	1	8	1	-	9
4.Kutai Timur	10	1	7	1	1	1
5.Berau	5	-	-	-	-	0
6.Penajam Paser Utara	1	-	1	2	-	0
7.Balikpapan	40	2	4	2	-	2
8.Samarinda	84	9	7	1	-	10
9.Bontang	11	1	3	-	-	-
Kalimantan Timur	213	15	45	12	2	29

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim, 2014

Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur adalah kebakaran dan disusul dengan banjir. Secara lebih terperinci, daerah yang berpotensi rawan bencana meliputi:

1. Gempa Bumi

Daerah rawan gempa bumi terdapat di Kabupaten Paser.

2. Banjir

Daerah rawan banjir terdapat hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, terutama di daerah perkotaan dan pemukiman. Sementara daerah banjir dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi adalah Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, dan Kota Samarinda.

3. Tanah Longsor

Daerah yang rawan terhadap bencana tanah longsor terdapat di daerah perkotaan seperti Kota Samarinda dan Kota Balikpapan

4. Kebakaran Hutan dan Lahan

Daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan terdapat di Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.

Secara Umum, Pada tahun 2010, jumlah bencana kebakaran mencapai angka 226 kasus, sementara di tahun 2013 jumlahnya menurun menjadi 213 kasus. Walaupun terjadi penurunan yang cukup signifikan, kasus kebakaran sebanyak 213 kali mulai Januari sampai Desember 2013 masih tergolong tinggi karena terjadi kenaikan dari

tahun sebelumnya (tahun 2012 sebanyak 165 kasus) dan kedepannya harus diupayakan meminimalisir bencana tersebut.

5. Tsunami

Meski tidak pernah mengalami tsunami, namun Provinsi Kalimantan Timur terdapat daerah yang rawan bencana tsunami. Daerah rawan tsunami adalah sepanjang pantai Provinsi Kalimantan Timur. Sementara daerah dengan tingkat kerawanan tsunami tinggi terdapat di Kota Balikpapan, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur.

2.1.4. DEMOGRAFI

Demografi merupakan ilmu yang dapat menggambarkan dan mempelajari segala persoalan-persoalan kependudukan suatu wilayah dari segi kuantitas, distribusi hingga komponen-komponen perubahannya. Kondisi demografi di Provinsi Kalimantan Timur sangat kompleks mengingat wilayah geografis yang begitu luas namun jumlah penduduk yang bisa dibilang belum tinggi. Selain itu distribusi penduduk yang menyebar tidak merata menimbulkan tantangan tersendiri dalam membuat kebijakan kependudukan agar pembangunan dirasakan setiap lapisan masyarakat.

1) Jumlah Penduduk

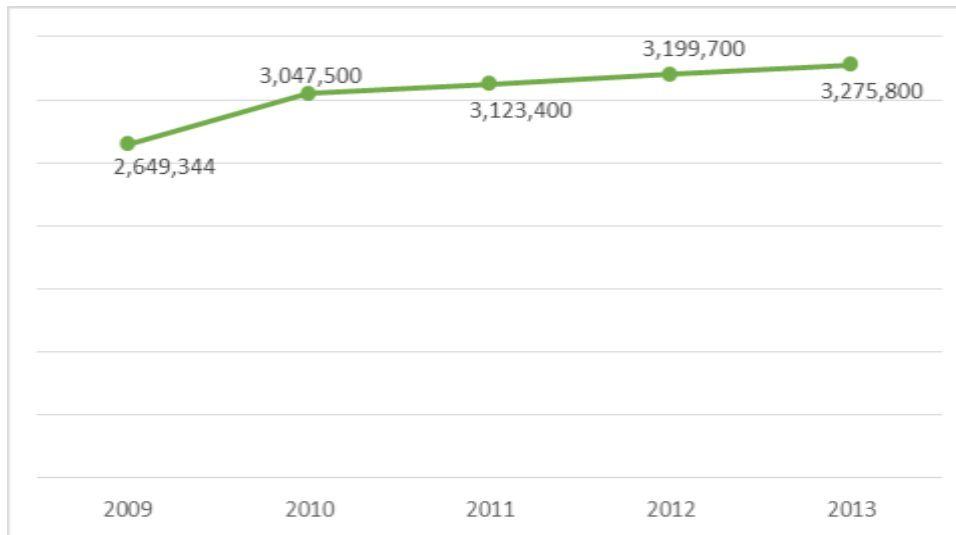
Penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Hal ini terlihat pada saat Sensus Penduduk tahun 2000 dimana jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur sejumlah 2.127.050 jiwa dan jumlah tersebut meningkat pesat 10 tahun kemudian menjadi 3.047.500 jiwa pada tahun 2010. Terakhir, berdasarkan penghitungan proyeksi penduduk didapatkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 sebanyak 3.275.800 jiwa.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Paser	231.700	237.800	244.100	250.000
2. Kutai Barat	140.800	142.000	143.100	144.000
3. Mahakam Ulu*	25.100	25.300	25.500	25.700
4. Kutai Kartanegara	630.900	648.200	665.500	683.100
5. Kutai Timur	257.600	269.400	281.600	294.200
6. Berau	180.300	186.000	191.600	197.400
7. PPU	143.600	146.000	148.000	150.200
8. Balikpapan	560.800	572.200	583.300	594.300
9. Samarinda	732.200	748.100	764.900	781.000
10. Bontang	144.500	148.400	152.100	155.900
Kalimantan Timur	3.047.500	3.123.400	3.199.700	3.275.800

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, Angka Proyeksi

Gambar 2. 3
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013

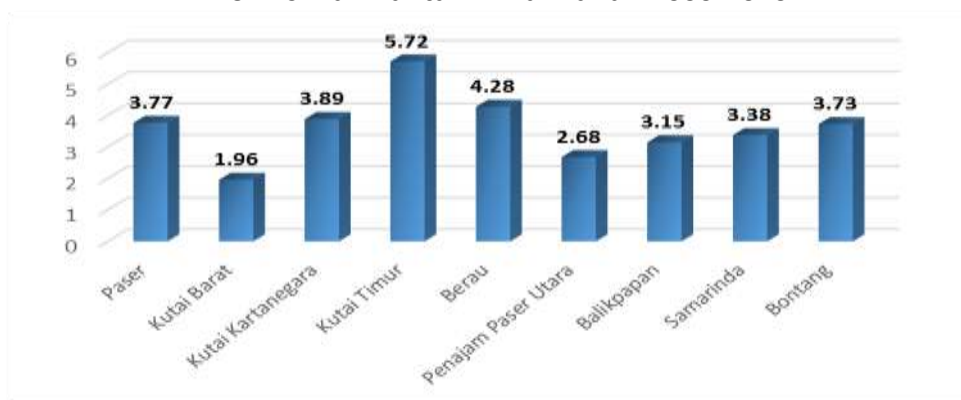


Sumber: BPS Prov. Kaltim

2) Pertumbuhan Penduduk

Pada periode tahun 2000 hingga 2010, rata-rata pertumbuhan penduduk (rata-rata per tahun) di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,60 persen sedangkan pada tahun 2010-2013 pertumbuhan penduduk hanya sebesar 2,43 persen. Selama kurun waktu 10 tahun (2000 s.d. 2010), kabupaten/kota yang paling cepat mengalami pertumbuhan penduduk adalah Kabupaten Kutai Timur dengan pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 5,72 persen, sedangkan kabupaten/kota yang pertumbuhannya paling lambat adalah Kutai Barat (termasuk Mahakam Ulu) yakni sebesar 1,96 persen.

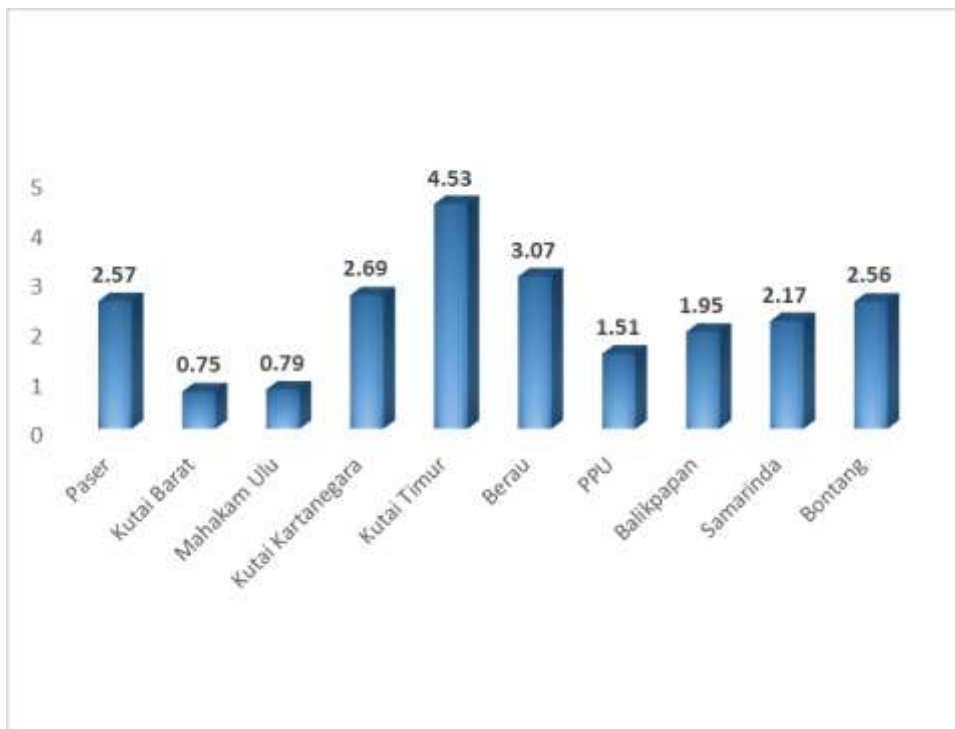
Gambar 2. 4
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2000-2010



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013

*Kutai Barat + Mahakam Ulu

Gambar 2. 5
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2013



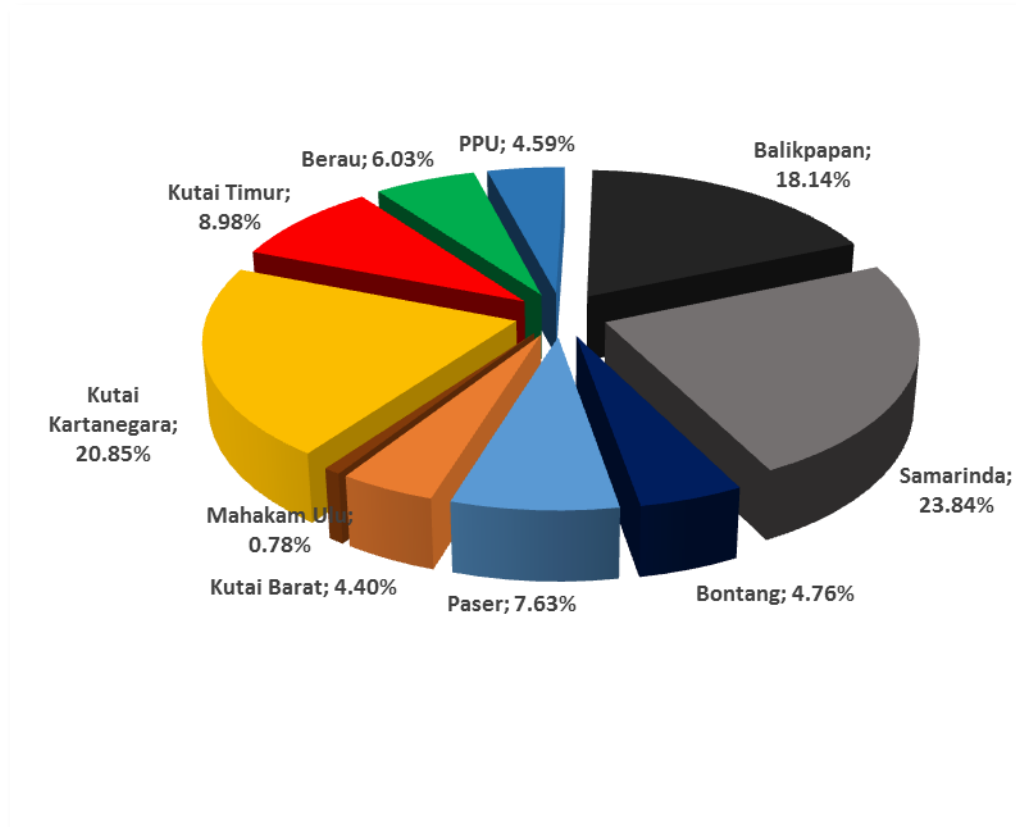
Sumber: BPS Prov. Kaltim

3) Distribusi Penduduk

Ketimpangan distribusi jumlah penduduk dengan luas wilayah di Provinsi Kalimantan Timur terjadi di antara wilayah kota dan kabupaten. Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur sejumlah 3 kota dan luas wilayahnya pun hanya sebesar 1,09 persen dari total wilayah, namun distribusi penduduk sebanyak 46,74 persen berada di kota dan sisanya 53,26 persen tinggal di kabupaten. Distribusi penduduk yang tidak merata inilah salah satu faktor penghambat terbesar dalam membangun Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh di setiap lapisan masyarakat.

Penduduk Provinsi Kalimantan paling banyak berdomisili di Kota Samarinda yaitu sebesar 23,84 persen. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat Kota Samarinda menjadi pusat pemerintahan sekaligus jasa perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang kurang dari 5 persen terdapat di Kota Bontang (4,76%), Kabupaten Penajam Paser Utara (4,59%) dan paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Hulu yang bahkan tidak mencapai 1 persen (0,78%).

Gambar 2. 6
Persentase Penduduk menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur

Secara umum, kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur sebesar 26,14 jiwa/km². Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang tinggal di dalamnya. Selain itu, persebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang tidak merata menyebabkan terjadinya perbedaan kepadatan penduduk antar daerah yang mencolok, terutama antar daerah kabupaten dengan kota. Wilayah 7 kabupaten dengan luas 98,91 persen dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur dihuni oleh sekitar 53,26 persen dari total penduduk Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan selebihnya, yaitu sekitar 46,74 persen menetap di 3 daerah kota dengan luas hanya 1,09 persen dari luas wilayah total Provinsi Kalimantan Timur. Akibatnya, kepadatan penduduk di daerah kabupaten hanya berkisar 1,68-47,96 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk di Kota Samarinda sebanyak 1.123,81 jiwa/km², Kota Balikpapan 1.178,42 jiwa/km² dan Kota Bontang 955,80 jiwa/km².

Tabel 2.6
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Daratan		Kepadatan Penduduk Per Km ²
	Km ²	%	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Paser	10.745,26	8,57	23,27
2. Kutai Barat	15.378,90	12,27	9,36
3. Mahakam Ulu	15.315,00	12,22	1,68
4. Kutai Kartanegara	25.716,41	20,52	26,56
5. Kutai Timur	31.735,19	25,32	9,27
6. Berau	21.951,71	17,51	8,99
7. Penajam Paser Utara	3.131,95	2,50	47,96
8. Balikpapan	504,32	0,40	1.178,42
9. Samarinda	694,96	0,55	1.123,81
10. Bontang	163,11	0,13	955,80
Jumlah	125.336,81	100,00	26,14

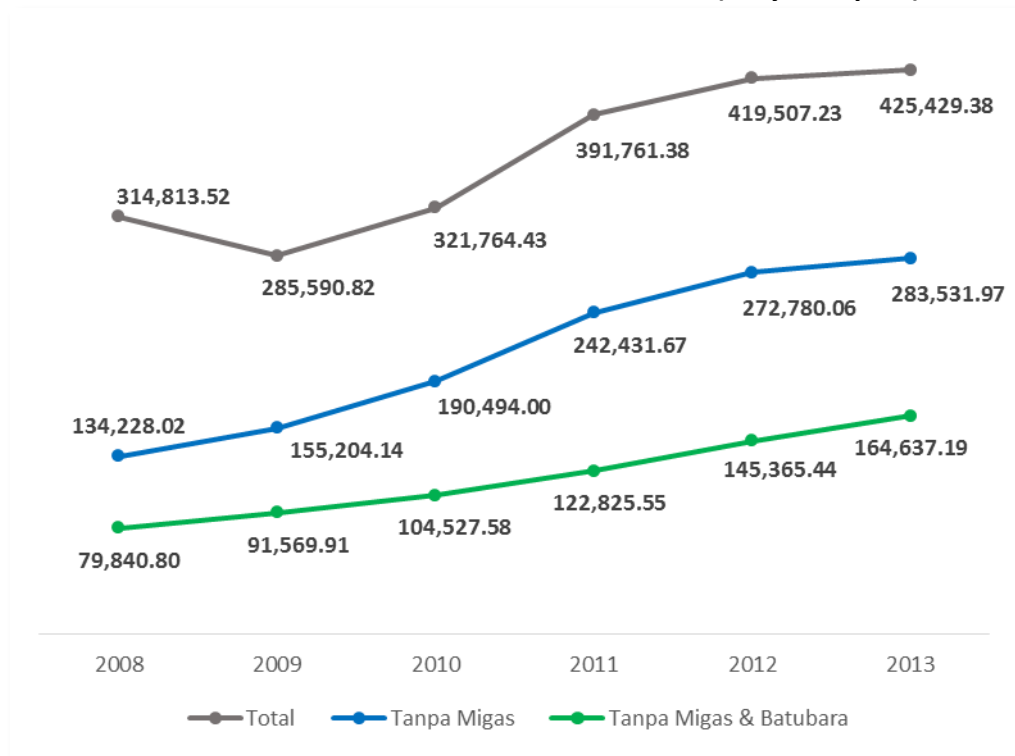
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator yang umum dipakai untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan, baik dengan minyak dan gas (migas) maupun tanpa migas. Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki ketergantungan sumber daya alam tak terbarui cukup tinggi sehingga analisis pada PDRB baik secara total (dengan migas+batubara) maupun partial tanpa adanya migas maupun batubara (non migas dan non migas+batubara) akan memberikan gambaran lebih proporsional jika dihubungkan dengan analisis mikro kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2. 7
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013 (Milyar Rupiah)



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013
*Data Prov.Kalimantan Timur termasuk Kaltara

Tabel 2.7
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2009 – 2013
Provinsi Kalimantan Timur (Juta Rupiah)

PDRB	2009	2010	2011 ^r	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB Harga Berlaku :					
➤ Migas	285.590.822	321.764.430	391.761.380	419.507.225	425.429.376
➤ Non Migas	155.204.138	190.493.999	242.431.672	272.780.957	283.531.972
PDRB Harga Konstan :					
➤ Migas	105.564.938	110.953.452	115.489.853	120.085.756	121.990.486
➤ Non Migas	60.031.034	67.041.256	75.123.448	83.545.189	87.860.464

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013

^r : angka revisi

*angka sementara

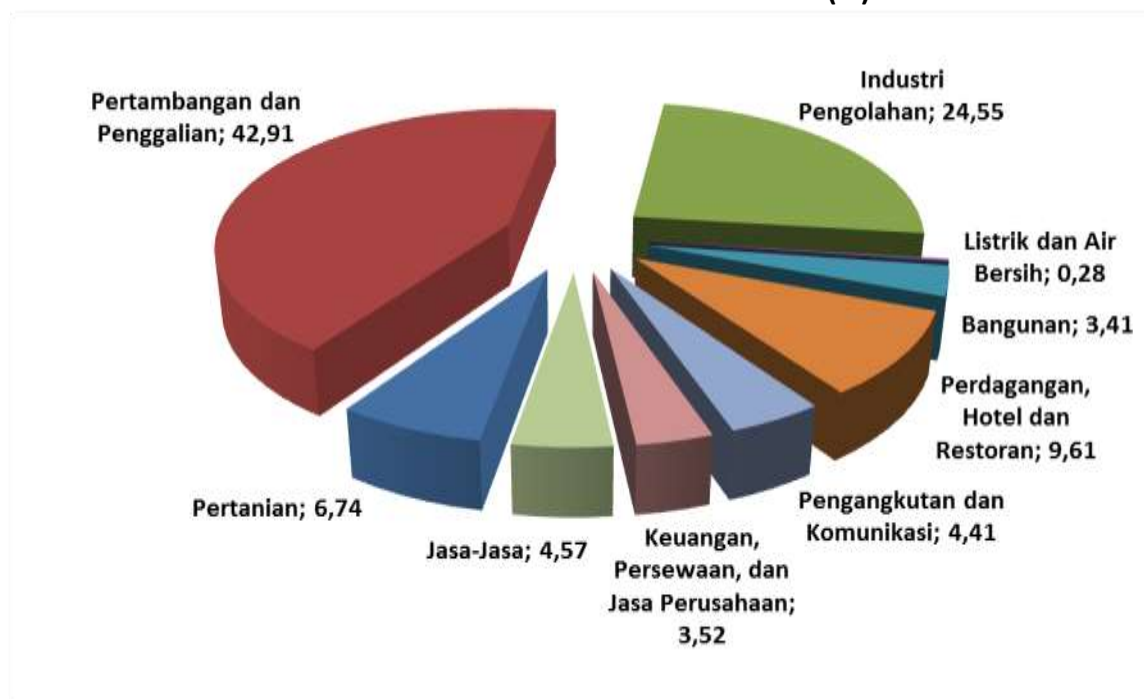
**angka sangat sementara

Secara umum, PDRB Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun naik secara signifikan hingga mencapai 419.507.225 juta rupiah atau lebih dari 419 triliun rupiah pada tahun 2012 dan mencapai 425,43 triliun pada tahun 2013. Angka ini cukup fantastis jika dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 314,81 triliun rupiah yang bahkan sempat mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi sebesar 285,59 triliun rupiah.

Meskipun PDRB Provinsi Kalimantan Timur tinggi, namun sebagian besar dikontribusi oleh sektor dari sumber daya alam yang tak terbarui terutama sektor minyak, gas, dan batubara. Hal ini akan menjadi sebuah masalah utama jika sumber daya alam tak terbarui tersebut makin menipis dan pemerintah belum maksimal mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis lain yang menunjang perekonomian. Terlihat pada gambar 2.7 bahwa perbedaan total PDRB Provinsi Kalimantan Timur jika dibandingkan dengan PDRB non migas+batubara (migas dan batubara dikeluarkan dari perhitungan PDRB) sangat jauh sekali. Pada tahun 2013, PDRB tanpa migas dan batubara hanya berkisar 164,64 trilyun atau sekitar 38,70 persen dari total PDRB secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih sangat tergantung dengan sumber daya alam tak terbarui terutama minyak, gas, dan batubara.

Bahkan secara nasional, angka PDRB Provinsi Kalimantan Timur memiliki andil yang tinggi dalam pembentukan PDB Nasional. Hal ini terlihat pada posisi besaran PDRB jika dibandingkan dengan PDRB provinsi-provinsi lain di Indonesia yang memiliki peringkat ke 6 PDRB terbesar se-Indonesia.

Gambar 2.8
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 (%)



**Data Prov.Kalimantan Timur termasuk Kaltara*

Persentase Nilai PDRB Atas Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 masih didominasi dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 47,12 persen diikuti sektor industri pengolahan dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 23,52 persen. Sedangkan sektor pertanian memberikan kontribusi sangat minim yaitu sebesar 6,33 persen. Pada tahun 2013, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami sedikit penurunan menjadi 42,91 persen terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan kontribusi sektor industri pengolahan mengalami peningkatan yakni menjadi 24,55 persen.

Untuk kontribusi sektor pertanian pada tahun 2013 ini mencapai 6,74 persen. Oleh karena itu, dalam pembangunan ke depan diharapkan Provinsi Kalimantan Timur mulai mengurangi ketergantungan dari sektor pertambangan dan penggalian dan mulai beralih ke sektor pertanian yang mampu dinikmati oleh masyarakat secara luas.

Tabel 2.8
PDRB Kabupaten/Kota Dengan Migas Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013 (%)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Paser	9 972 212	13 207 170	16 516 742	17 653 569	18 952 743
2. Kutai Barat + Mahakam Ulu	5 899 931	6 831 573	8 083 976	8 946 886	9 830 904
3. Kutai Kartanegara	90 100 482	100 465 050	125 676 272	133 944 716	133 002 681
4. Kutai Timur	28 627 177	34 247 873	45 748 620	50 184 448	54 584 880
5. Berau	6 983 756	8 079 229	9 607 427	11 187 561	12 817 247
6. Penajam Pasir Utara	2 577 863	2 923 171	3 845 144	4 106 817	4 735 554
7. Balikpapan	36 521 932	41 108 129	45 176 739	47 282 323	52 668 717
8. Samarinda	21 077 418	23 664 836	33 267 694	35 819 217	41 562 545
9. Bontang	52 664 325	53 366 144	62 051 947	68 481 634	69 416 637

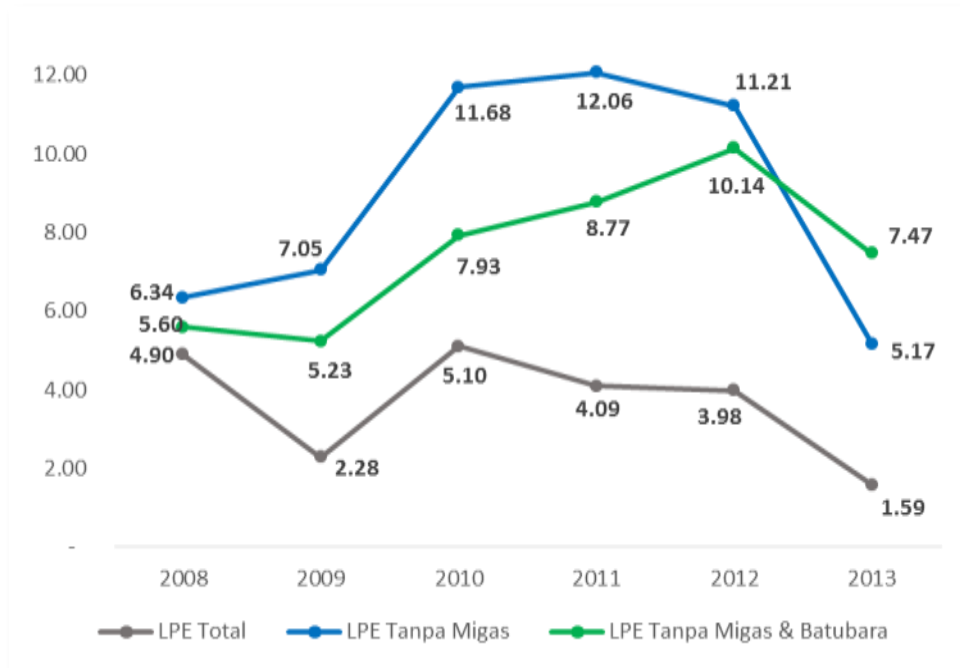
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur,

- **Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu titik tolak pembangunan suatu daerah yaitu dengan melihat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat memang menjadi syarat utama atau indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output (tergantung dari jenis output yang diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang. Hal menarik terkait perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur yakni bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur jauh dibawah pertumbuhan ekonomi nasional, namun kontribusi Provinsi Kalimantan Timur terhadap pendapatan nasional sangat tinggi.

Hal menarik terkait perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur yakni bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur jauh dibawah pertumbuhan ekonomi nasional, namun kontribusi Provinsi Kalimantan Timur terhadap pendapatan nasional sangat tinggi. Hal ini dikarenakan tingginya kontribusi sektor migas dan batubara dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pada kontribusi PDRB nasional. Namun yang perlu digarisbawahi adalah produksi minyak, gas, dan batubara terus menurun dari tahun ke tahun yang menyebabkan penurunan nilai tambahnya sehingga pertumbuhan ekonomi juga ikut menurun meskipun PDRB masih tergolong tinggi.

Gambar 2.9
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013
*Data Prov.Kalimantan Timur termasuk Kaltara

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2008 hingga 2013 cukup berfluktuatif dan mengalami tren penurunan pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur mencapai 4,90 persen kemudian satu tahun setelahnya pertumbuhan ekonomi turun drastis menjadi 2,28 persen. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi kembali membaik dan naik mencapai angka 5,10 persen, namun pada tahun 2011 kembali terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang disusul penurunan kembali pada tahun 2012 menjadi 3,98 persen walaupun masih melebihi target pada tahun 2012 sebesar 3,53 persen. Akhirnya, pada tahun terakhir yakni 2013, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur mencapai titik terendah dalam kurun waktu enam tahun terakhir yakni hanya 1,59 persen dan menjadi provinsi yang mengalami pertumbuhan paling rendah diantara 33 provinsi di Indonesia.

Jika diperhatikan kinerja pertumbuhan yang melemah banyak dipengaruhi oleh komoditas migas dan batubara. Hal ini tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas maupun tanpa batubara. Jika tanpa migas, laju pertumbuhan ekonomi Kaltim ternyata mencapai 5,17 persen pada tahun 2013. Bahkan pada tahun 2010 – 2012 pertumbuhan ekonomi Kaltim tanpa migas berada pada posisi dua digit, di atas 11 persen. Selanjutnya, jika migas dan batubara dikeluarkan maka pertumbuhan ekonomi Kaltim jauh lebih besar, yaitu 7,47 persen pada tahun 2013. Bahkan ketika pertumbuhan ekonomi Kaltim yang menurun sejak 2010, justru pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batubara meningkat dari 2010 – 2012, yaitu masing-masing 7,93 persen, 8,77 persen dan 10,14 persen.

Jika dirata-ratakan, pertumbuhan ekonomi Kaltim selama periode 2008 – 2013 mencapai 3,66 persen pertahun. Akan tetapi jika tanpa migas, pertumbuhan ekonomi Kaltim lebih dari dua kali lipatnya, yaitu 8,92 persen per tahun. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi Kaltim tanpa migas dan tanpa batubara dengan nilai 7,52 persen per tahun. Ini menjadi indikasi positif bahwa transformasi ekonomi Kaltim ke arah *renewable resources* sudah berjalan.

Tabel 2.9
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013 (%)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Paser	7,74	17,31	9,78	7,53	8,79
2. Kutai Barat + Mahakam Ulu	6,89	6,10	7,85	7,04	6,20
3. Kutai Kartanegara	2,08	4,19	0,87	3,44	0,71
4. Kutai Timur	5,60	9,33	11,43	12,68	3,43
5. Berau	5,98	8,04	7,93	7,99	7,40
6. Penajam Pasir Utara	3,51	7,28	11,68	3,61	3,75
7. Balikpapan	1,70	5,19	7,44	2,53	5,20
8. Samarinda	4,49	6,16	15,26	3,47	5,59
9. Bontang	-3,03	-3,44	-8,36	-7,19	-6,40
Kalimantan Timur	2,28	5,10	4,09	3,98	1,59

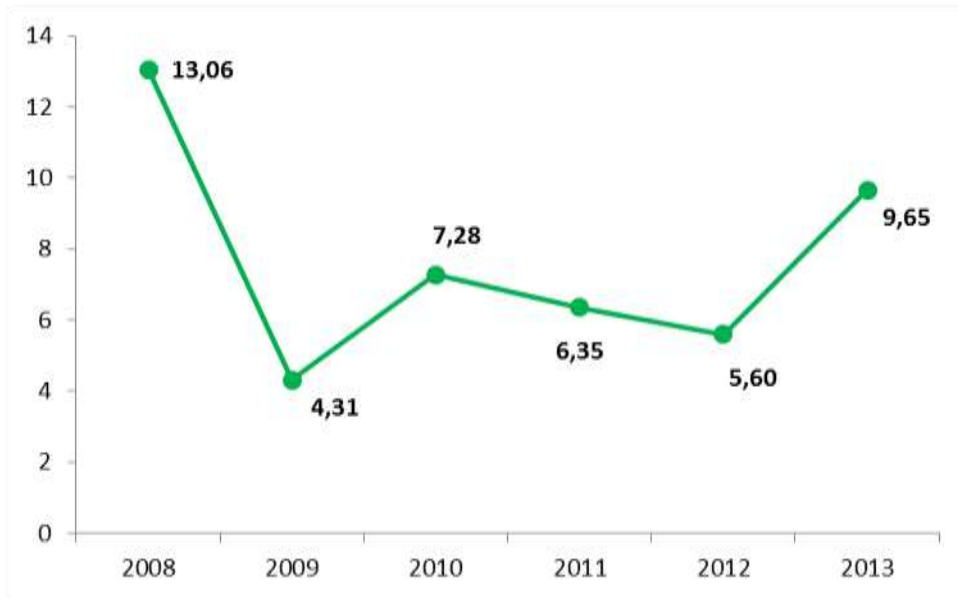
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013

• Laju Inflasi

Dalam pembangunan ekonomi, faktor stabilitas harga sangat penting untuk diamati dan diperhatikan mengingat fluktuasi harga sangat berpengaruh pada nilai barang dan jasa yang di hasilkan, serta berdampak pada daya beli masyarakat. Inflasi merupakan salah satu alat ukur untuk melihat stabilitas harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu.

Provinsi Kalimantan Timur melakukan penghitungan inflasi dibangun dari 3 kota IHK yakni Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Tarakan. Selama tahun 2010-2013, inflasi Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan yang berarti stabilitas harga terjaga dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur tidak bergejolak seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2013, terjadi lonjakan inflasi yang cukup signifikan hingga mencapai 9,65 persen pada inflasi tahunannya.

Gambar 2.10
Nilai Inflasi Year on Year Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013
(Termasuk Tarakan)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013

Tabel 2.10
Laju Inflasi Kota Samarinda, Balikpapan, Tarakan dan Kalimantan Timur
Tahun 2008 - 2013

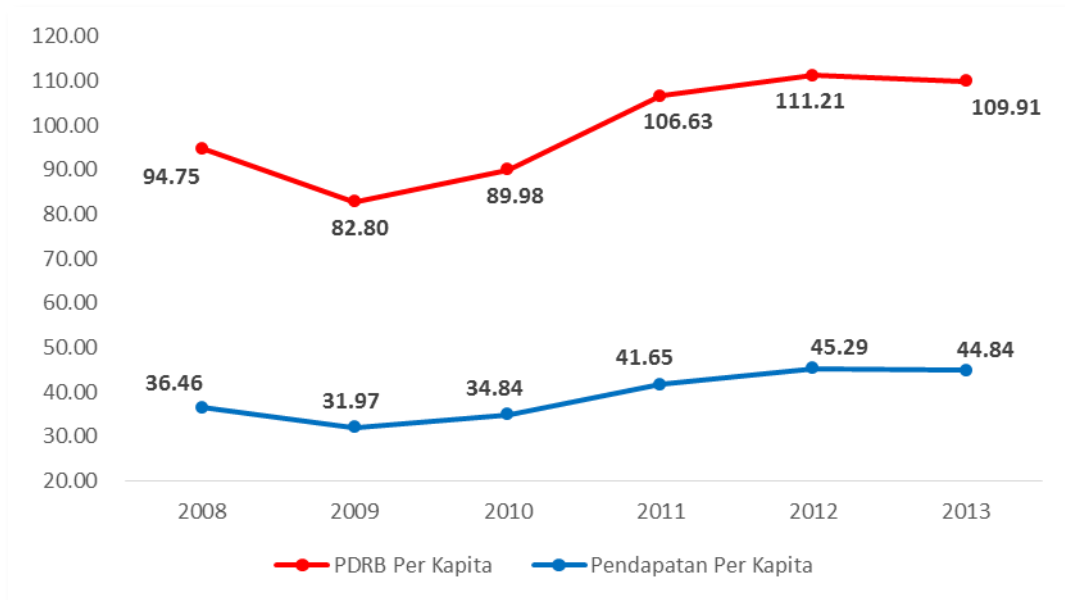
Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Samarinda	12,69	4,06	7	6,23	4,81	10,37
Balikpapan	11,3	3,6	7,38	6,45	6,41	8,56
Kalimantan Timur (Termasuk Kaltara)	13,06	4,31	7,28	6,35	5,6	9,65

Sumber : BPS Prov. Kaltim

- **Pendapatan Per Kapita**

PDRB dan Inflasi diatas dapat menggambarkan kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur secara umum, namun belum dapat memberikan informasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat secara umum berdasarkan pendapatan per kapita yaitu pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun setidaknya dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

Gambar 2.11
PDRB dan Pendapatan Regional Perkapita 2008-2013
Provinsi Kalimantan Timur (Juta Rupiah)



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013
*Data Prov.Kalimantan Timur termasuk Kaltara

Selain penurunan yang terjadi pada periode 2008-2009, angka pendapatan regional per kapita Provinsi Kalimantan Timur selalu mengalami kenaikan yang relatif signifikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2009, pendapatan per kapita sekitar 31,97 juta rupiah dan 4 tahun berselang hampir mencapai 44,84 juta rupiah pada tahun 2013. Selain pendapatan per kapita, PDRB per kapita juga bisa menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, terjadi kenaikan PDRB per kapita di setiap kabupaten/kota yang mengindikasikan terjadi kenaikan tingkat perekonomian di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.11
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota dan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2012

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Paser	44.752.353	57.002.151	69.726.940	72.064.332
2. Kutai Barat + Mahakam Ulu	36.340.813	41.190.780	47.144.033	51.717.601
3. Kutai Kartanegara	148.760.444	159.358.300	191.693.648	195.853.258
4. Kutai Timur	117.755.461	132.992.670	172.297.557	179.410.863
5. Berau	40.490.001	44.821.852	51.651.999	55.640.363
6. PPU	18.460.647	20.355.494	25.902.294	26.997.042
7. Balikpapan	67.323.271	73.339.403	78.007.216	79.048.073

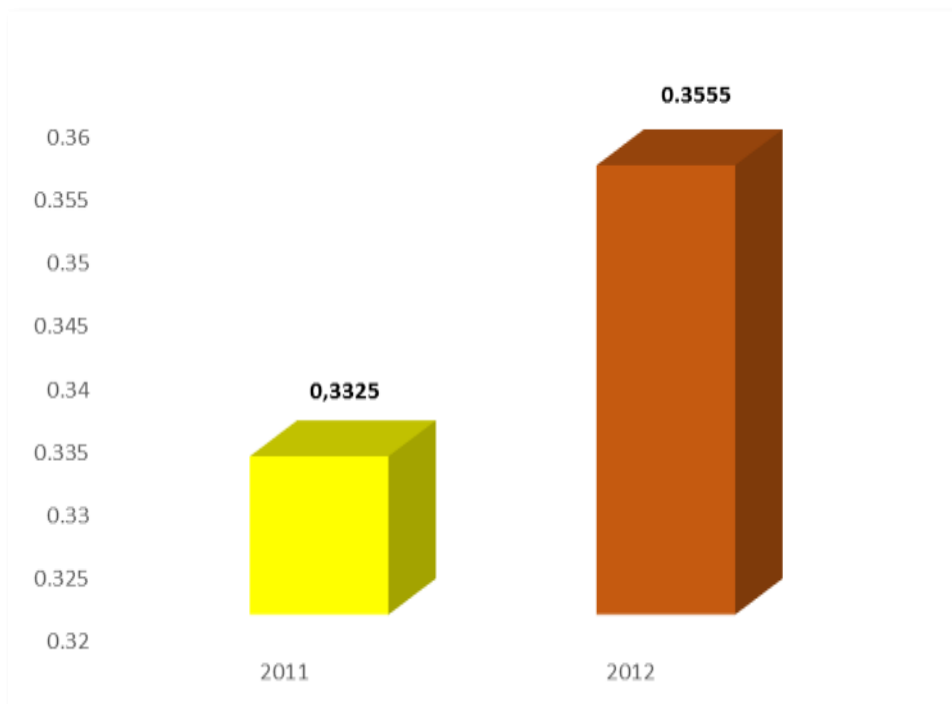
8. Samarinda	29.841.343	32.353.939	44.470.265	46.015.026
9. Bontang	378.700.219	369.318.432	415.791.865	443.668.089

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013

- **Indeks Gini**

Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Gambar 2.12
Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2011-2012



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur
*Data Prov.Kalimantan Timur termasuk Kaltara

Indeks gini dalam kurun waktu 2011-2012 mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat secara horisontal di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penambahan ketimpangan dalam artian pemerataan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kalimantan Timur lebih tidak merata jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Para ahli ekonomi masih menganggap “wajar” jika gini ratio berada di kisaran 0,3 sehingga dapat dikatakan pemerataan pendapatan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur masih dikategorikan wajar.

Tabel 2.12
Indeks Gini Kabupaten/Kota
dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 – 2012

Kabupaten/Kota	2011	2012
(1)	(2)	(3)
1. Paser	0,3119	0,3588
2. Kutai Barat + Mahakam Ulu	0,2435	0,2967
3. Kutai Kartanegara	0,2992	0,2984
4. Kutai Timur	0,2913	0,3099
5. Berau	0,3190	0,3076
6. PPU	0,3046	0,3241
7. Balikpapan	0,3292	0,3608
8. Samarinda	0,3066	0,3332
9. Bontang	0,3694	0,3913
Kalimantan Timur (termasuk Kaltara)	0,3325	0,3555

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Secara umum, seluruh kabupaten/kota mengalami ketimpangan pendapatan yang meningkat dari 2011-2012 dimana indeks gini mengalami peningkatan mendekati angka 1. Pemerataan pendapatan yang paling baik berada di Kabupaten Kutai Barat (0,2967) sedangkan ketimpangan pendapatan paling tinggi berada di Kota Bontang dengan indeks gini sebesar 0,3913. Meskipun secara umum terjadi kenaikan ketimpangan pendapatan, namun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat terjadi pada Kabupaten Kutai Kartanegara dan Berau karena terjadi penurunan gini rasio.

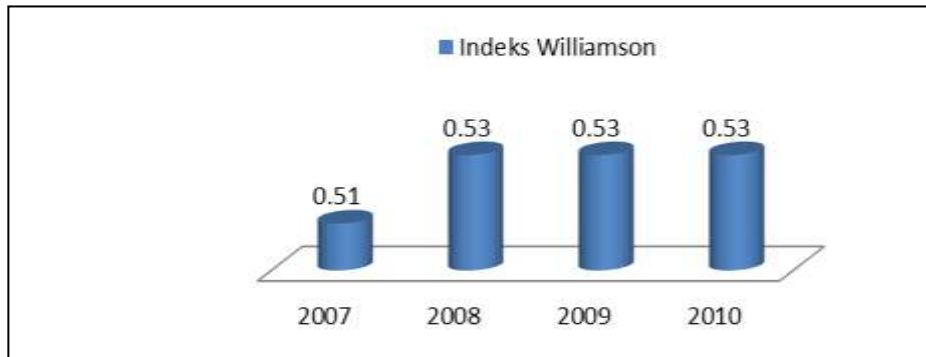
- **Indeks Ketimpangan Williamson**

Pertumbuhan ekonomi secara alami akan menghasilkan pula ketimpangan ekonomi, meski besarnya bersifat relatif. Perbedaan sumber daya antarwilayah, akses, dan tingkat kemudahan mobilitas barang dan jasa memberi andil dalam terciptanya ketimpangan tersebut.

Untuk mengukur ketimpangan ekonomi regional dapat dilakukan dengan menggunakan indeks ketimpangan Williamson. Indeks ini dihitung dengan menggunakan data PDRB per kapita dan jumlah penduduk. Besaran angka Indeks Williamson (IW) adalah $0 \leq IW \leq 1$, dimana jika angka indeks mendekati 0 (nol) maka tingkat kesenjangan ekonomi rendah dan jika angka indeks mendekati 1 (satu) maka tingkat ketimpangan tinggi.

Dari grafik di bawah, dapat dilihat bahwa tingkat ketimpangan ekonomi antarkabupaten di Provinsi Kalimantan Timur masih relatif tinggi dengan angka indeks sebesar 0,53.

Gambar 2.13
Indeks Williamson Tahun 2007-2010



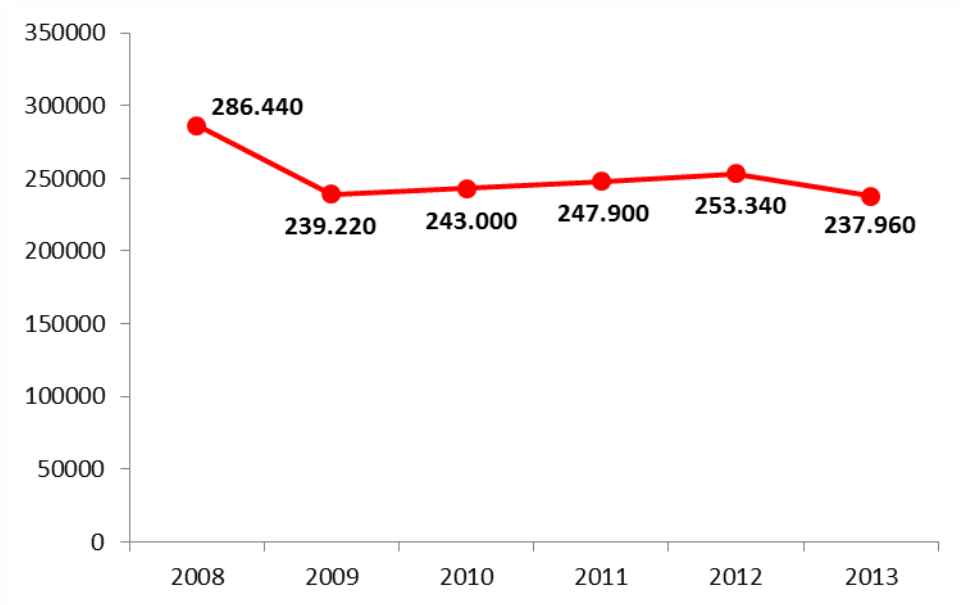
Sumber: Bappeda 2011

- **Angka Kemiskinan**

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur pada rentang 2008 hingga 2009 mengalami penurunan secara absolut maupun persentasenya yakni dari 286.440 (9,51%) menjadi 239.220 (7,73%). Namun pada tahun-tahun berikutnya yakni 2009 hingga 2012, kemiskinan absolut naik di tiap tahunnya meskipun persentase kemiskinan menurun.

Pada tahun 2009 terdapat penduduk miskin sebanyak 239.220 jiwa atau 7,73 persen dari total penduduk dan pada tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan jumlah absolut penduduk miskin dari sebesar 243.000 jiwa pada tahun 2010 kemudian 247.900 jiwa pada tahun 2011 dan mencapai 253.340 jiwa pada tahun 2012. Pada Tahun 2013 menurun menjadi 237.960 jiwa.

Gambar 2.14
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013

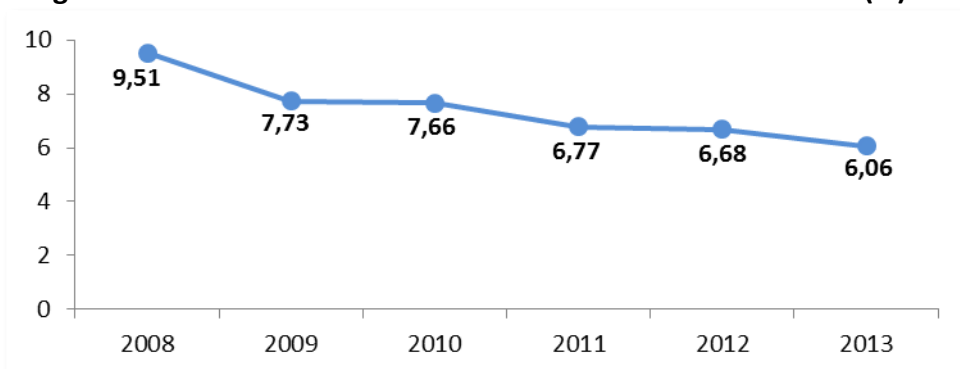


Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013

*) Data Prov.Kalimantan Timur termasuk Kaltara (Kondisi Bulan Maret)

Meskipun tahun 2009-2012 jumlah penduduk miskin memiliki trend naik, namun secara persentase (angka kemiskinan) terjadi penurunan yang disebabkan pengaruh jumlah penduduk sebagai pembanding. Jumlah penduduk ini juga berhubungan dengan rasio penduduk miskin, karena tingkat umur berkaitan dengan produktivitas seseorang dan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pada tahun 2008 hingga tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah sukses menurunkan angka kemiskinan. Hal itu ditandai dengan realisasi angka kemiskinan yang selalu menurun yaitu sebesar 9,51 persen pada tahun 2008 dan menurun drastis menjadi 6,77 persen pada tahun 2011, kemudian 6,68 persen pada tahun 2012 hingga tahun 2013 kembali terjadi penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 6,06 persen.

Gambar 2.15
Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013

*) Data Prov.Kalimantan Timur termasuk Kaltara (Kondisi Bulan Maret)

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, secara absolut jumlah penduduk miskin tahun 2012 paling sedikit adalah Kota Bontang yakni berjumlah 8.100 jiwa dan terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 47.100 jiwa. Namun jika dilihat

persentasenya, maka angka kemiskinan tertinggi berada di Kutai Timur (8,77%) dan paling rendah Balikpapan (3,30%).

Tabel 2.13
Jumlah dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2011 – 2012

Kabupaten/Kota (1)	2011		2012	
	Absolute (4)	% (5)	Absolute (6)	% (7)
1. Paser	19.100	7,91	19.000	7,64
2. Kutai Barat	14.300	8,25	14.200	8,28
3. Mahakam Ulu				
4. Kutai Kartanegara	47.300	7,21	47.100	6,94
5. Kutai Timur	25.300	9,43	25.200	8,77
6. Berau	10.300	5,46	10.300	5,24
7. Penajam Pasir Utara	13.000	8,67	12.900	8,57
8. Balikpapan	19.800	3,39	19.700	3,30
9. Samarinda	32.900	4,31	32.800	4,18
10. Bontang	8.100	5,40	8.100	5,20
Kalimantan Timur	190.100	-	189.300	-

*Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, 2013 (*Kondisi Bulan September)*

- **Angka Kriminalitas yang Tertangani**

Angka Kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur rata-rata sebanyak 5,9 kasus per tahun setiap 10.000 penduduk. dengan angka terbesar pada tindak kriminal selama 1 tahun dengan rata-rata 2.175 kasus per tahun. Adapun kasus terbesar yaitu pencurian dengan rata-rata 609 kasus per tahun. Banyaknya kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 2.14
Angka Kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 - 2013

Jenis Kriminalitas	2009	2010	2011	2012	2013
1. Jumlah kasus narkoba	1.559	589	455	589	761
2. Jumlah kasus pembunuhan	40	31	24	47	29
3. Jumlah kejahatan seksual	56	42	30	33	26
4. Jumlah kasus penganiyaan	254	285	309	271	399
5. Jumlah kasus pencurian	555	692	528	602	666
6. Jumlah kasus penipuan	572	620	577	573	623
7. Jumlah kasus pemalsuan uang	8	18	3	5	7
8. Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	2.044	2.277	1.926	2.120	2.511
9. Jumlah penduduk	2.699.324	3.047.500	3.123.400	3.199.700	3.275.800
10. Angka kriminalitas (8)/(9) x 10.000	7,57	7,47	6,17	6,63	7,67

Sumber: Polda Kaltim

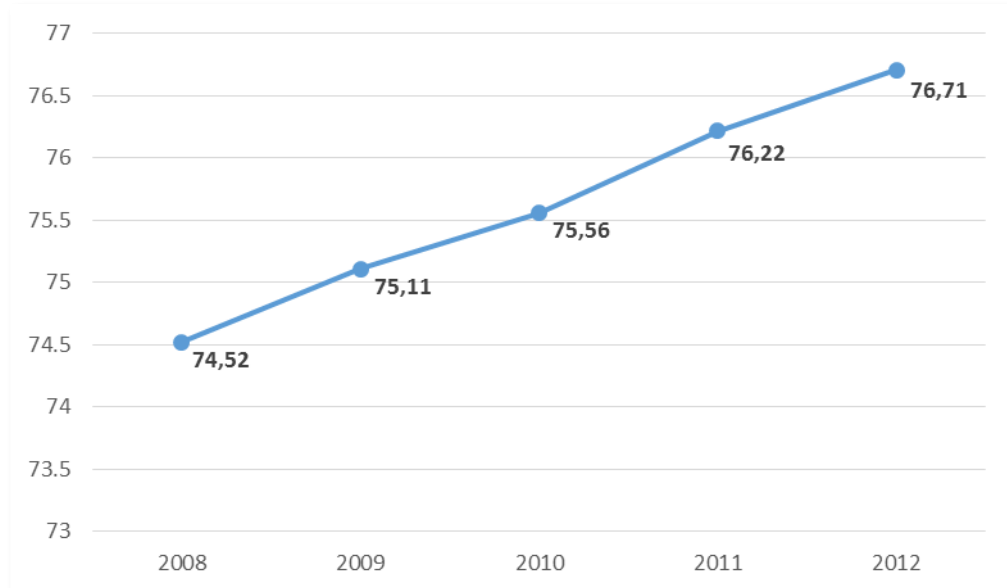
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Fokus kesejahteraan sosial menguraikan tentang pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

- **IPM**

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketrampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Gambar 2.16
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2012



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013
*) Data Prov. Kalimantan Timur termasuk Kaltara

Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index (HDI)* yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programmes (UNDP)* sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dengan IPM, kita bisa melakukan analisis perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah. IPM sendiri dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup

(kesehatan), Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan) dan Daya Beli Per Kapita (standar hidup layak/ekonomi).

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur sudah menempati posisi yang tinggi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pada tahun 2012, IPM mencapai 76,71 sehingga angka ini menempatkan Provinsi Kalimantan Timur pada posisi kelima IPM tertinggi di Indonesia. Tentu saja ini menjadi prestasi yang membanggakan bagi seluruh lingkungan pemerintah provinsi, namun perlu diketahui bahwa IPM ini merupakan angka makro pembangunan secara umum dan perlu tindak lanjut serius dalam pembangunan kesejahteraan manusia secara mikro agar pembangunan daerah berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pada periode 2008 hingga 2012, IPM di Provinsi Kalimantan Timur mengalami tren peningkatan di setiap tahunnya. IPM tahun 2008 sudah mencapai 74,52 dan sudah di atas rata-rata nasional bahkan peringkat 6 se-Indonesia. Di tahun-tahun berikutnya, IPM terus mengalami kenaikan hingga terakhir tahun 2012 angka IPM Provinsi Kalimantan Timur mencapai 76,71 dan menduduki peringkat 5 level nasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan mengalami kenaikan di tiap tahunnya dari tahun 2008-2012. Wilayah administrasi kota menduduki peringkat tiga besar IPM yakni Kota Balikpapan (79,38), Kota Samarinda (78,26) dan Kota Bontang (77,85). Sedangkan untuk wilayah kabupaten, Paser memiliki IPM paling tinggi yakni mencapai 75,85 dan terendah IPMnya ada di Kutai Timur dengan indeksnya sebesar 73,75.

Tabel 2.15
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 – 2012

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Paser	73,46	73,99	74,66	75,40	75,85
2. Kutai Barat dan Mahakam Ulu	72,16	72,60	72,90	73,69	74,05
3. Kutai Kartanegara	72,03	72,50	72,89	73,51	74,24
4. Kutai Timur	70,84	71,23	72,05	72,88	73,75
5. Berau	72,75	73,22	73,84	74,63	75,05
6. PPU	72,69	73,11	73,59	74,03	74,35
7. Balikpapan	77,31	77,86	78,33	78,85	79,38
8. Samarinda	76,12	76,68	77,05	77,63	78,26
9. Bontang	76,08	76,52	76,88	77,52	77,85
Kalimantan Timur (dengan Kaltara)	74,52	75,11	75,56	76,22	76,71

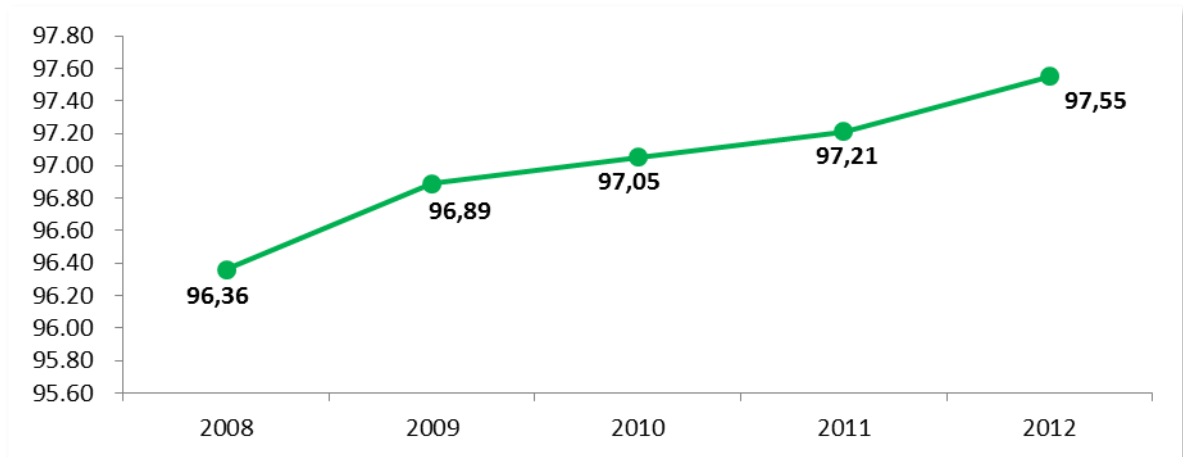
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013

• Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Tingginya pendidikan masyarakat berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Timur. Dalam

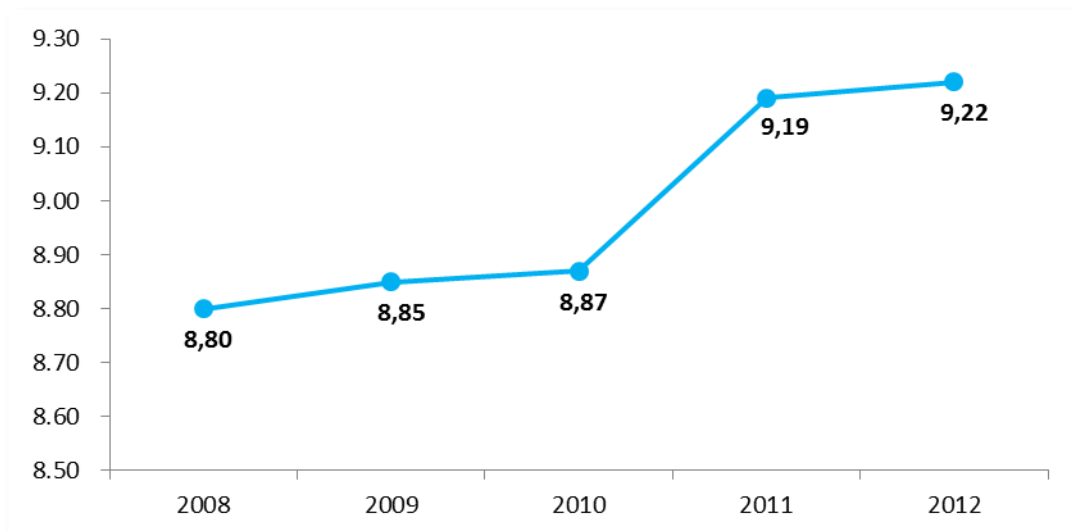
penghitungan IPM, indikator makro yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Gambar 2.17
Angka Melek Huruf Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2012 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013
*) Data Prov. Kalimantan Timur termasuk Kaltara

Gambar 2.18
Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2012 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur 2013
*) Data Prov. Kalimantan Timur termasuk Kaltara

Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur jika dilihat dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Trend yang meningkat di tiap tahunnya mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan. Hal ini akan lebih maksimal jika selain dalam segi kuantitas pendidikan juga diimbangi dari segi kualitas pendidikan sehingga

output dari pendidikan itu sendiri bisa menjadi sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Tabel 2.16
Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2012

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Paser	94,61	95,41	96,00	96,70	96,71
2. Kutai Barat	95,49	95,97	95,97	96,60	96,61
3. Mahakam Ulu					
4. Kutai Kartanegara	96,41	96,87	96,87	97,31	98,33
5. Kutai Timur	95,48	95,89	97,28	98,25	99,29
6. Berau	95,48	96,30	97,18	97,20	97,26
7. PPU	94,46	94,93	95,55	95,57	95,77
8. Balikpapan	98,32	98,37	98,76	98,78	98,86
9. Samarinda	97,23	97,91	98,01	98,02	98,56
10. Bontang	98,34	99,08	99,20	99,21	99,22
Kalimantan Timur (dengan Kaltara)	96,36	96,89	97,05	97,21	97,55

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013

Tabel 2.17
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2012

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Paser	7,61	7,75	7,85	8,08	8,10
2. Kutai Barat	7,75	7,86	7,80	8,20	8,21
3. Mahakam Ulu					
4. Kutai Kartanegara	8,30	8,38	8,33	8,70	8,76
5. Kutai Timur	7,61	7,65	7,86	8,08	8,47
6. Berau	7,86	8,03	8,13	8,58	8,62
7. PPU	7,57	7,58	7,66	7,68	7,71
8. Balikpapan	10,03	10,08	10,08	10,26	10,46
9. Samarinda	9,73	9,77	9,80	9,93	10,36
10. Bontang	9,97	10,07	10,04	10,11	10,40
Kalimantan Timur (dengan Kaltara)	8,80	8,85	8,87	9,19	9,22

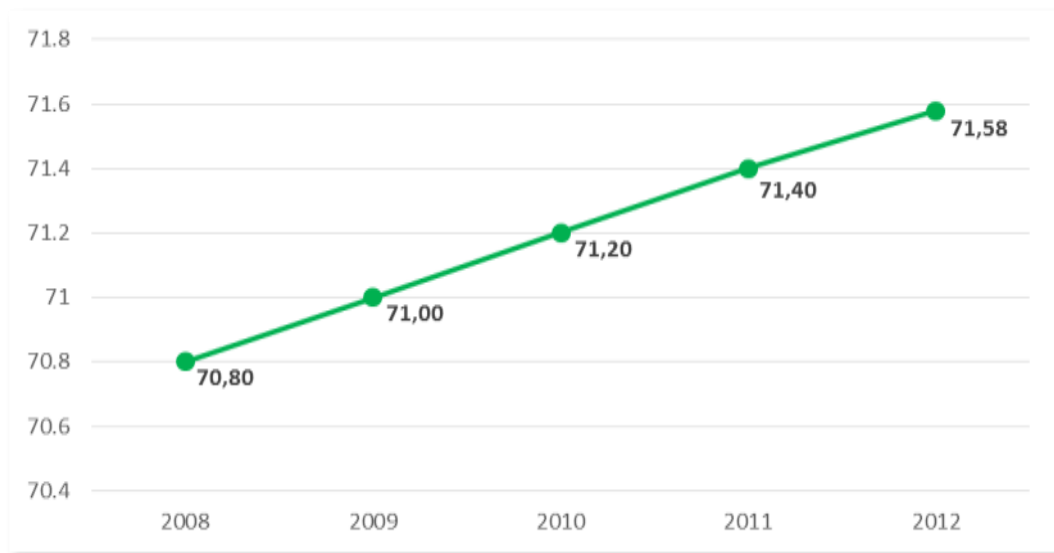
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013

● Kesehatan

Angka Harapan Hidup merupakan indikator penyusun IPM dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup. Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun semakin meningkat yang artinya pembangunan di bidang kesehatan terus ditingkatkan. Pada tahun 2008, angka harapan

hidup di Provinsi Kalimantan Timur mencapai usia 70,80 tahun dan pada tahun 2012 meningkat hingga mencapai usia 71,58 tahun dengan interpretasi bayi yang lahir pada tahun 2012 akan memiliki peluang hidup hingga usia 71-72 tahun.

Gambar 2.19
Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008-2012 (tahun)



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, 2013

*) Data Prov. Kalimantan Timur termasuk Kaltara

Tabel 2.18
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2012

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Paser	72,74	73,09	73,44	73,79
2. Kutai Barat	70,08	70,16	70,39	70,61
3. Mahakam Ulu				
4. Kutai Kartanegara	67,85	67,93	68,05	68,17
5. Kutai Timur	68,43	68,61	68,82	69,03
6. Berau	69,66	69,92	70,18	70,43
7. Penajam Pasir Utara	71,32	71,46	71,63	71,80
8. Balikpapan	71,95	72,17	72,39	72,61
9. Samarinda	71,01	71,21	71,42	71,62
10. Bontang	72,26	72,42	72,60	72,78
Kalimantan Timur (Dengan Kaltara)	71,00	71,20	71,40	71,58

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, 2013

• Ketenagakerjaan

Penduduk yang bekerja merupakan orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan

selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu. Penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur berdasarkan :

1) Menurut Lapangan Usaha

Penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Timur menurut lapangan usaha mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.19
Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2013

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013
Pertanian	456.437	454.258	459.077	432.219
Pertambangan	115.862	162.640	161.898	164.924
Industri	83.176	84.554	96.777	98.335
Listrik, Gas Dan Air	6.339	7.063	6.186	6.366
Bangunan	88.337	85.327	104.930	105.382
Perdagangan	327.424	364.266	347.740	351.357
Angkutan	78.249	76.774	73.704	73.974
Keuangan	43.885	48.236	54.420	52.888
Jasa	282.189	307.885	314.386	338.827
Jumlah	1.481.898	1.591.003	1.619.118	1.624.272

Sumber : BPS Prov. Kaltim

2) Menurut Tingkat Pendidikan

Penduduk yang bekerja menurut tingkat pendidikan tahun 2010-2013

Tabel 2.20
Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2012

Pendidikan	2010	2011	2012	2013*)
≤ SD	544.726	571.432	582.409	579.779
SMTP	277.805	298.131	280.373	279.273
SMTA Umum	320.622	352.807	363.340	363.491
SMTA Kejuruan	180.311	203.008	202.155	247.164
Diploma I/II/III/Akademi	64.756	57.376	52.307	68.815
Universitas	93.678	108.249	138.534	183.330
Jumlah	1.481.898	1.591.003	1.619.118	1.721.816

Sumber : BPS Prov. kaltim

*) : Kondisi Februari 2013

3) Penduduk Bekerja, Persentase Pengangguran, dan Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur

Tabel 2.21
Penduduk Bekerja, Persentase Pengangguran, dan Partisipasi Angkatan Kerja
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur (Agustus 2013)

Kabupaten / Kota	Total Penduduk 15+	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Bukan Angkatan Kerja	TPAK	TPT
1. Paser	177.575	110.147	99.953	10.194	67.428	62,03	9,25
2. Kutai Barat	120.343	88.755	81.630	7.125	31.588	73,75	8,03
3. Kutai Kartanegara	485.189	301.228	279.013	22.215	183.961	62,08	7,37
4. Kutai Timur	208.334	136.475	128.164	8.311	71.859	65,51	6,09
5. Berau	137.310	87.619	82.497	5.122	49.691	63,81	5,85
6. Penajam Paser Utara	105.822	66.384	61.090	5.294	39.438	62,73	7,97
7. Balikpapan	436.628	283.995	261.431	22.564	152.633	65,04	7,95
8. Samarinda	576.823	350.751	320.698	30.053	226.072	60,81	8,57
9. Bontang	109.326	72.218	64.134	8.084	37.108	66,06	11,19
Kalimantan Timur	2.357.350	1.497.572	1.378.610	118.962	859.778	63,53	7,94

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Sanggar seni dan budaya di Kalimantan Timur mencakup grup sanggar kesenian, sanggar seni ukir, sanggar seni lukis/gambar dan sanggar seni teater. Rendahnya capaian tahun 2012 disebabkan sanggar-sanggar kesenian di Kabupaten/Kota masih tidak aktif, selain itu sanggar-sanggar kesenian yang tidak terdaftar walaupun keberadaannya tetap eksis sampai sekarang, juga adanya pembaharuan data organisasi seni di daerah.

Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda diberbagai bidang pembangunan sejumlah 1.100 orang yang mengikuti kegiatan pemuda pelopor, pertukaran pemuda antar Provinsi dan antar Negara, paskibra, penyuluhan narkoba dan HIV/AIDS, pemuda sarjana penggerak pembangunan, kepramukaan, pelatihan pramuka, jamboree pemuda Indonesia dan bimbingan pemuda.

Tabel 2.22
Data Seni, Budaya dan Olahraga
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2013

Indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013
Jumlah sanggar seni dan seni budaya yang terbina	778	778	778	790
Jumlah benda cagar budaya digali dan dilestarikan	36	64	170	190
Jumlah masyarakat yang mengenal seni budaya daerah		4.050	5.050	7.000
Jumlah terbinanya seni budaya daerah		105	200	200
Pelatihan sarjana penggerak pembangunan perdesaan	41	50	0	20
Penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	44	200	200	200

Sumber : Renstra Disparbud dan Renstra Dispora, 2014

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pada bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, baik pada urusan pelayanan wajib dan urusan pilihan.

2.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Provinsi Kalimantan Timur memang sudah mulai ada perbaikan, namun masih perlu adanya peningkatan terutama sarana prasarana penunjang pendidikan.

▪ Pendidikan

1) Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator untuk melihat angka pendidikan di setiap jenjangnya tanpa melihat umur penduduk yang mengenyam bangku sekolah. APK Provinsi Kalimantan Timur dalam 4 (empat) tahun terakhir untuk SD/MI relatif menurun. Hal ini menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk diluar usia SD/MI (7-12 tahun) yang bersekolah di jenjang SD/MI semakin menurun mengingat persentase sudah melebihi 100 persen namun menurun di tiap tahunnya. Sedangkan pada APK jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA secara umum terlihat trendnya meningkat di tiap tahunnya.

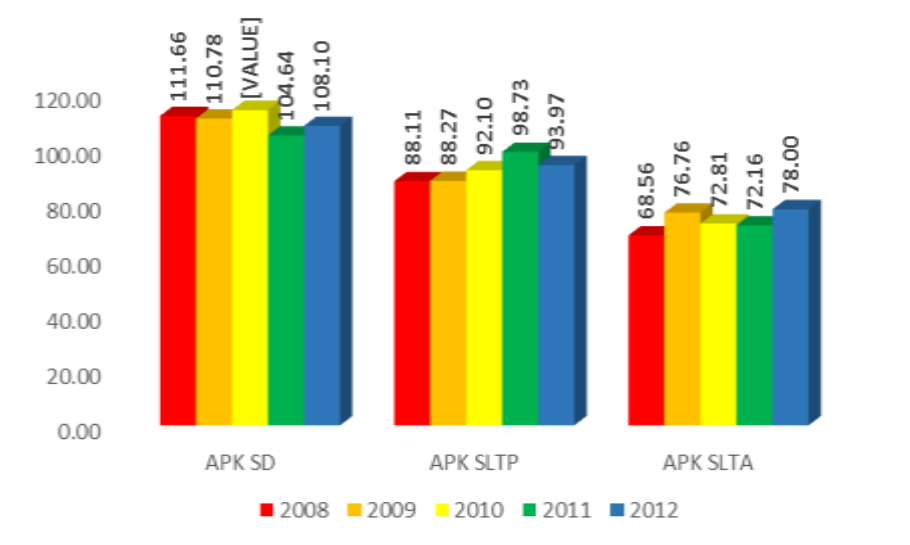
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah angka yang digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang seharusnya bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2008-2011, secara umum APM SD/MI mengalami penurunan sedangkan APM SMP/MTs dan APM SMA/SMK/MA mengalami kenaikan. Jadi penduduk usia 7-12 tahun yang mengenyam pendidikan SD/MI mengalami penurunan, sedangkan penduduk usia 12-15 tahun yang mengenyam bangku SMP/MTs mengalami kenaikan begitu pula untuk usia 16-18 tahun yang duduk di bangku SMA/SMK/MA.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya. Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APS yang terus mengalami trend kenaikan mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah yang memang seharusnya bersekolah semakin meningkat.

Keberhasilan peningkatan angka partisipasi pendidikan tidak terlepas dari dukungan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan pemerintah secara langsung dapat dilihat dari pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah, pemberian beasiswa kepada pelajar (hingga tahun 2013, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah

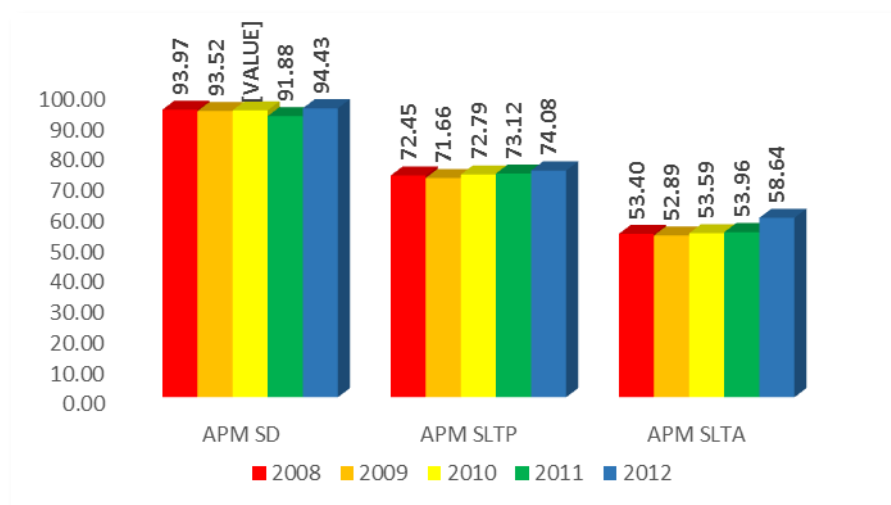
memberikan kepada 187 ribu pelajar dan mahasiswa dan menerima penghargaan MURI atas prestasinya tersebut), hingga peningkatan insentif tenaga pengajar. Sedangkan dukungan secara tidak langsung dapat dilihat pada peningkatan sarana prasarana pendukung pendidikan seperti perbaikan jalan menuju akses pendidikan, peningkatan jangkauan listrik ke desa-desa terpencil, dan sebagainya.

Gambar 2.20
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2012



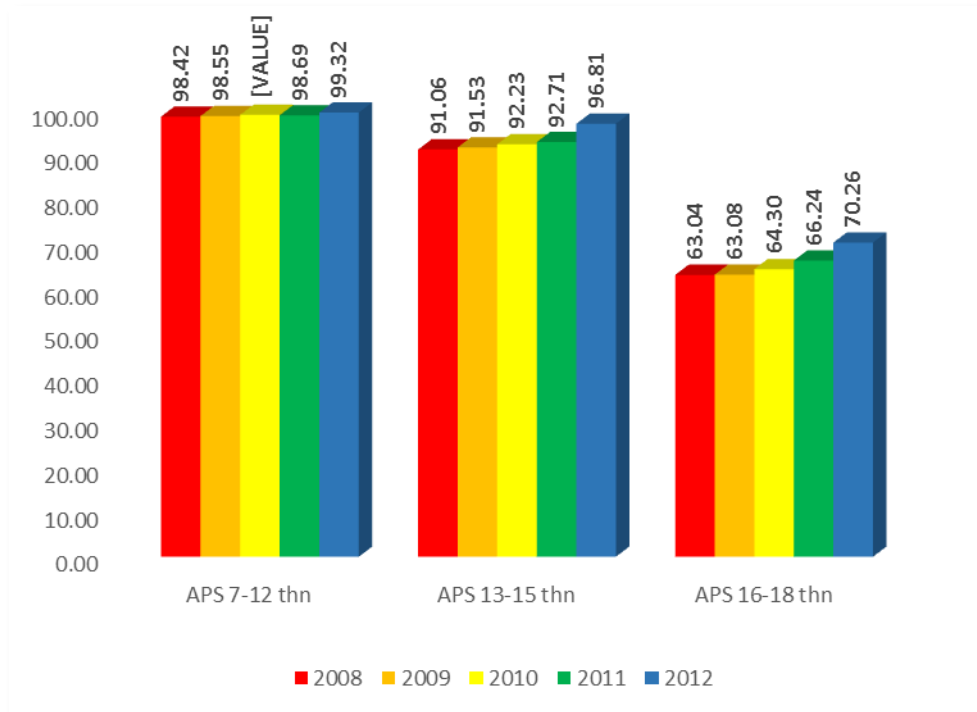
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013
*Data Prov.Kalimantan Timur termasuk Kaltara

Gambar 2.21
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2012



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013
*Data Prov.Kalimantan Timur termasuk Kaltara

Gambar 2.22
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kategori Umur
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2012

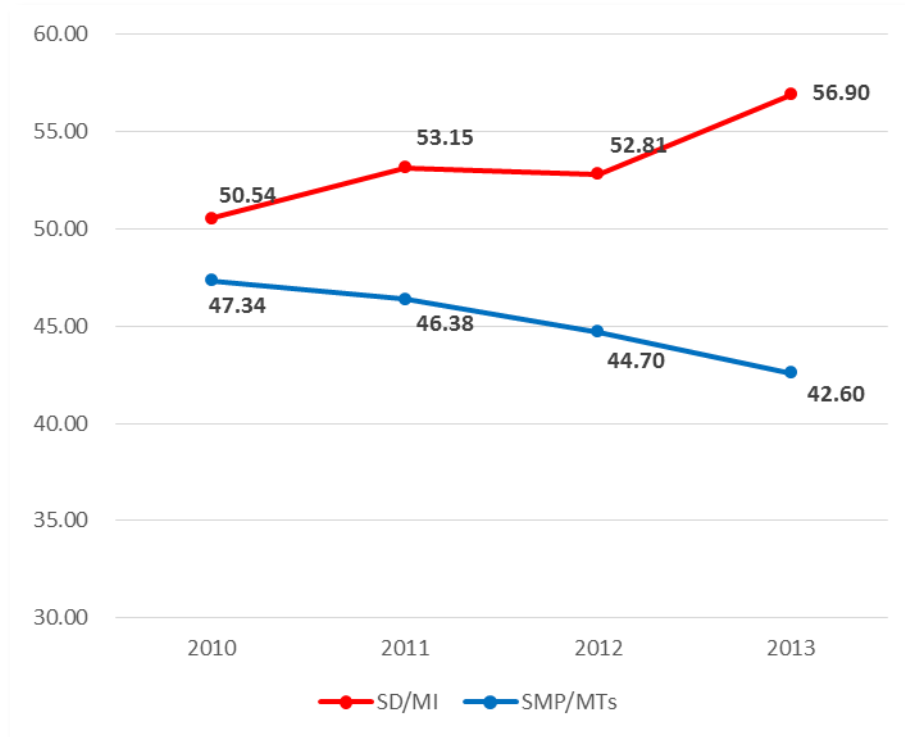


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013
 *Data Prov.Kalimantan Timur termasuk Kaltara

2) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ini menggambarkan tingkat ketersediaan sekolah per jumlah penduduk usia sekolah. Capaian ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah sekolah. Pada jenjang SD/MI meningkat dari 50,54 pada tahun 2010 menjadi 75 pada tahun 2013 yang berarti terdapat sebanyak 75 gedung sekolah SD/MI yang tersedia untuk 10.000 penduduk usia sekolah 7-12 tahun. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs meningkat dari 47,34 pada tahun 2009 menjadi 62 pada tahun 2013 yang berarti terdapat sebanyak 62 gedung sekolah SMP/MTs yang tersedia untuk 10.000 penduduk usia sekolah 13-15 tahun.

Gambar 2.23
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2013



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur 2013

3) Rasio Guru terhadap Murid

Rasio ini menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid dimana memperlihatkan kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Rasio guru dan murid pada jenjang pendidikan dasar selama tahun 2008-2013 sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar yang mensyaratkan rasio guru dan murid sebesar 1:32.

Tabel 2.23
Rasio Murid terhadap Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013

Rasio Murid Terhadap Guru	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD Negeri	17	17	16	17	13	14
SD Swasta	18	17	12	17	13	14
Madrasah Ibtidaiyah	16	12	15	13	13	14
SMP Negeri	14	15	15	15	11	13
SMP Swasta	10	9	9	8	9	11

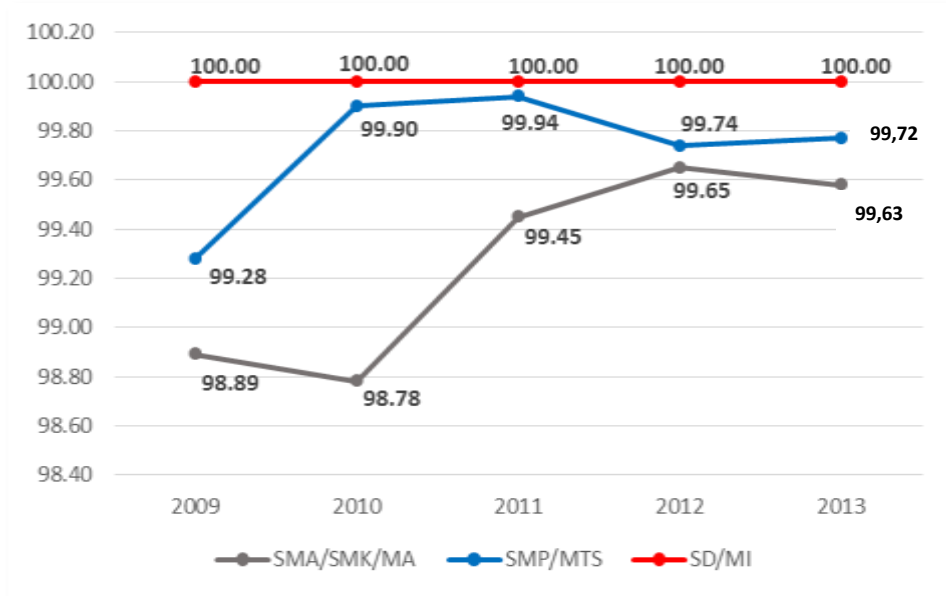
Madrasah Tsanawiyah	8	9	9	9	12	11
SMA Negeri	13	14	14	13	13	14
SMA Swasta	9	11	10	10	12	8
Madrasah Aliyah	7	6	6	6	5	8
SMK	15	12	12	9	12	12

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

4) Angka Kelulusan

Jika ditarik garis lurus (linier), secara umum angka kelulusan di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK mengalami penurunan dalam kurun waktu satu tahun terakhir (2012-2013) sedangkan pada jenjang SMP/MTs mengalami kenaikan meskipun belum mencapai 100% seperti angka kelulusan jenjang SD/MI. Penurunan persentase kelulusan di SMA/SMK/MA perlu menjadi perhatian khusus oleh dinas terkait karena meskipun sudah mencapai persentase yang cukup tinggi, namun penurunan ini perlu diwaspadai.

Gambar 2.24
Angka Kelulusan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

■ Kesehatan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah melihat bagaimana perkembangan kesehatan masyarakat baik dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan maupun tingkat kesehatan penduduk. Pada Tabel 2.16, terlihat bahwa perkembangan jumlah tenaga medis dan paramedis selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami perkembangan tercepat bila dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang lain. Peningkatan jumlah dokter, tenaga medis maupun paramedis akan berdampak kepada masyarakat khususnya kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan baik berobat atau konsultasi kesehatan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga medis dan paramedis, aspek pelayanan kesehatan yaitu mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan terlatih juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2007, persentase penduduk yang mendapat pertolongan tenaga kesehatan terlatih sebesar 80,11 persen dan pada tahun 2012 meningkat hingga mencapai angka 90,83 persen. Secara keseluruhan, kondisi ini berdampak pada peningkatan indikator kesehatan masyarakat seperti angka usia harapan hidup yang meningkat dari 70,50 pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 71,58 pada tahun 2012. Selain itu menurunnya angka kematian bayi yaitu dari 26,0 pada tahun 2007 menjadi 16,7 bayi yang meninggal dari 1000 kelahiran pada tahun 2010.

Selain itu, persentase gizi balita yang naik dari 84,1 persen pada tahun 2008 dan meningkat menjadi 93,23 persen pada tahun 2009 merupakan indikator kesehatan lain yang perlu diperhatikan. Walaupun data yang ditampilkan hanya dua tahun, namun hal ini cukup menjadi dasar untuk melihat trend perbaikan gizi balita.

Tabel 2.24

**Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007-2012**

No	Indikator	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Dokter Umum	557	660	663	665	673	794
2.	Dokter Spesialis	279	262	264	281	215	276
3.	Dokter Gigi	177	207	212	213	276	262
4.	Perawat	624	1.606	1.609	1.551	1.627	1627
5.	Penyebaran HIV Aids	278	183	217	413	473	-
6.	Rasio Dokter	0,3961	0,3621	0,4211	0,3826	0,3700	0,41
7.	Rasio Bidan	-	41,30	-	-	45,09	-
8.	Angka Morbiditas (%)	16,07	15,55	17,32	16,88	11,74	-
9.	Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih	80,11	81,95	85,24	87,35	88,61	90,83
10.	Penduduk dengan pengobatan sendiri	63,07	63,82	69,19	71,95	65,47	-
11.	Penduduk dengan Keluhan Kesehatan	27,58	27,82	28,88	30,31	22,46	22,33
12.	Angka Kematian Bayi	26,00	28,11	27,40	16,70	-	-
13.	Angka Kematian Balita	38,00	-	-	32,00	-	-
14.	Angka Kematian Ibu	128,00	-	110,00	101,00	-	-
15.	Usia Harapan Hidup	70,50	70,80	71,00	71,20	71,40	71,58
16.	Persentase Gizi Balita (Gizi Baik)	-	84,10	93,23	-	-	-

Sumber: Data dan Informasi Pembangunan Kalimantan Timur, 2012

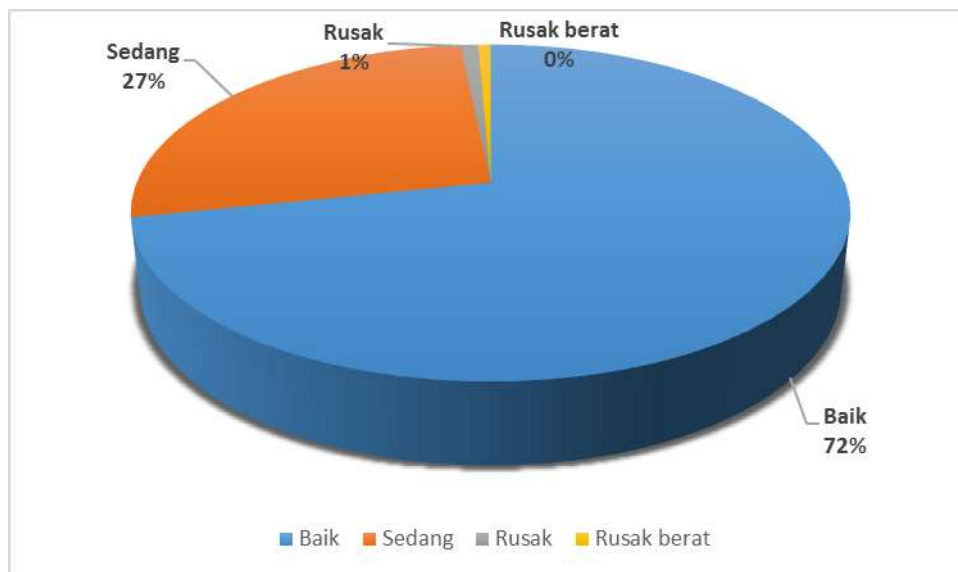
*) No 5 sd 16 Data masih tergabung dlm 14 Kab/Kota

■ Pekerjaan Umum

Indikator penting dalam bidang Pekerjaan Umum adalah proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dimana hal ini mengindikasikan akses sarana prasarana transportasi sebagai penunjang pembangunan yang sangat vital. Sebanyak 83,97 persen jalan di Provinsi Kalimantan Timur berada dalam kondisi baik dan 15,09 persen dalam kondisi sedang. Sisanya sebesar 0,465 persen jalan mengalami kerusakan, bahkan 0,466 persen kondisinya rusak parah.

Gambar 2.25

Persentase Jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten/Kota Menurut Kondisi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012



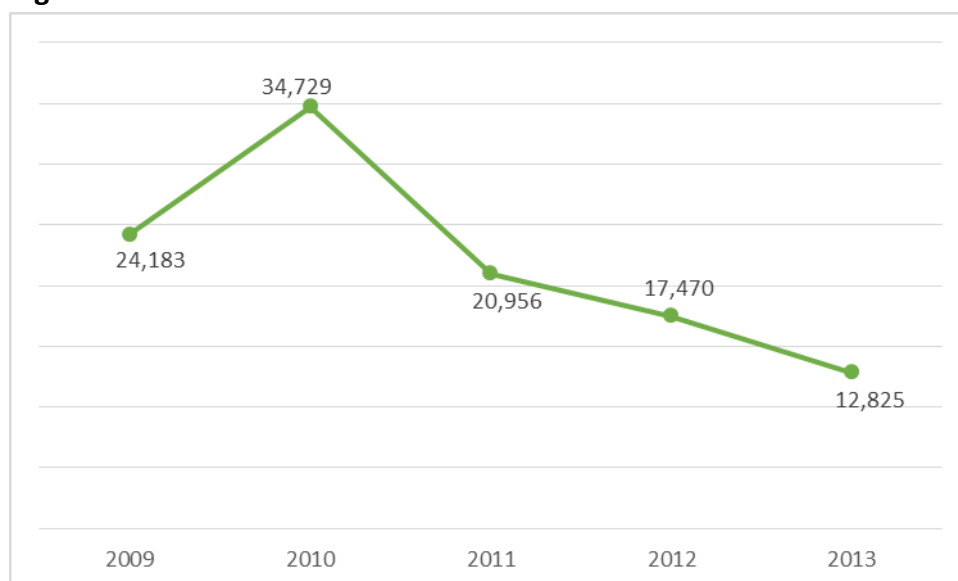
Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013

Irigasi dalam Kondisi Baik

Irigasi dalam kondisi baik di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Perbaikan dalam hal irigasi sebagai penunjang sektor pertanian terus ditingkatkan dari sepanjang 6.486 meter pada tahun 2007 menjadi 10.801 meter pada tahun 2011.

Gambar 2.26

Irigasi dalam Kondisi Baik di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007-2011



Sumber: Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur 2013

■ Perumahan

Jumlah rumah layak huni, cakupan ketersediaan rumah layak huni, cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dan cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.25
Perumahan di Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2013

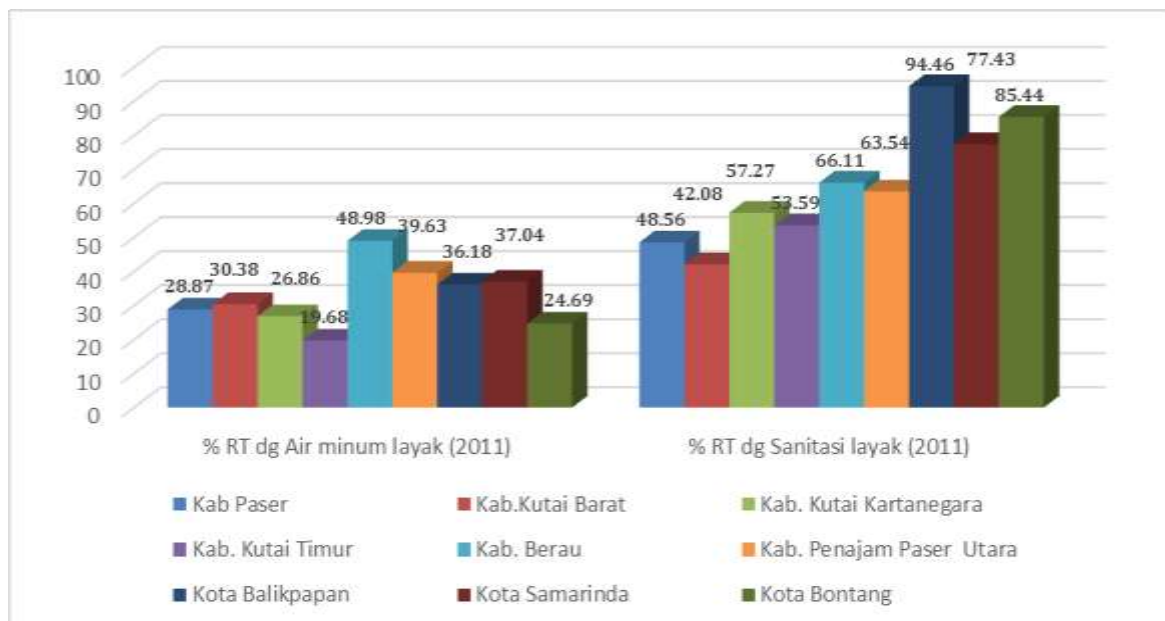
No	Indikator	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Jumlah rumah layak huni	444.919	679.369	533.400	605.607
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	87,00	89,30	87,00	85,22
3	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	1,50	1,51	1,49	1,47
4	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (%)	12,94	17,44	17,44	17,44

Sumber : Dinas PU, 2013

Air Bersih

Pada tahun 2011 rumah tangga yang menggunakan air layak untuk diminum paling tinggi berada di Berau dan itupun hanya 48,98 persen. Sedangkan pengguna paling minim air minum yang layak adalah Kutai Timur sebesar 19,68 persen. Untuk rumah dengan sanitasi layak di Provinsi Kalimantan Timur didominasi di daerah perkotaan. Kota Balikpapan menempati urutan pertama dengan 94,46 persen rumah dengan sanitasi layak kemudian disusul oleh Bontang dan Samarinda, sedangkan persentase terendah berada di Kutai Barat dengan persentase 42,08 persen.

Gambar 2.27
Persentase RT Dengan Air Minum dan Sanitasi Yang Layak Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 (%)



Sumber: Data Base Pembangunan Prov. Kalimantan Timur 2012

■ Penataan Ruang

Proses pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik sejak tahun 2009 sampai 2013, hal ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.26
Aspek Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Progress perda rencana tata ruang	30	40	50	60	70

Sumber : Renstra Dinas PU, 2013

■ Perencanaan Pembangunan

Tersedianya dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan perda merupakan salah satu alat untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan di Kalimantan Timur, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.27
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2013

Dokumen	Nomor Perda	Ketersediaan
RPJPD Tahun 2005-2025	Perda No.15 Tahun 2008	Ada
RPJMD Tahun 2009-2013	Perda No. 04 Tahun 2009	Ada
RKPD Tahun 2014	PerGub No. 34 Tahun 2013	Ada

Sumber : Bappeda, 2014

■ Perhubungan

Untuk transportasi darat, data yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012, jumlah kendaraan bermotor meningkat menjadi sebanyak 1.869.377 unit dengan jumlah terbesar terdapat di Kota Samarinda (29,77%).

Pada tahun 2012, jumlah kecelakaan lalu lintas menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 1.213 menjadi 1.185 kejadian. Jumlah kerugian material dan korban juga mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Jumlah kecelakaan tertinggi terjadi di Kota Balikpapan yang mencapai 22,45 persen dari total kecelakaan di Provinsi Kalimantan Timur.

Lalu lintas kapal antar pulau tahun 2012 melalui lima belas pelabuhan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kapal tiba di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 16.037 kapal dengan jumlah penumpang sebanyak 230.291 orang dan kapal berangkat 16.363 kapal dengan jumlah penumpang 183.334 orang. Bila diamati dari lalu lintas kapal

maka arus terbesar melalui pelabuhan di Samarinda, namun bila diamati dari lalu lintas penumpang terbesar melalui pelabuhan Balikpapan.

Untuk bongkar barang baik antar pulau maupun antar negara, tercatat data tahun 2009 sebanyak 4.112.842 ton yang terdiri dari antar pulau 3.620.745 ton dan antar negara 492.097 ton. Sedangkan muat barang sebanyak 929.127.819 ton yang terdiri dari antar pulau 34.863.105 ton dan antar negara 894.264.714 ton. Bila diamati dari jenis barang terbanyak yang dibongkar adalah kayu lapis, sedangkan yang dimuat adalah batu bara.

Tabel 2.28
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2012

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pertumbuhan Angkutan Laut					
	a. Armada Kapal	35.700	45.079	27.431	26.879	26.885
	b. Jumlah penumpang yang turun	546.434	591.108	293.555	288.008	230.291
	c. Jumlah penumpang yang naik	500.586	591.204	228.241	195.916	183.334
2.	Pertumbuhan Angkutan Udara					
	a. Jumlah penumpang yang datang	1.779.060	1.982.904	2.579.474	2.326.301	3.314.794
	b. Jumlah penumpang yang berangkat	1.878.272	2.222.553	2.579.474	2.224.340	3.220.804
	c. Pertumbuhan dan Jumlah barang yang di muat	9.693.979	10.634.012	12.442.694	11.455.994	15.157.127
	d. Jumlah bagasi di bongkar	16.527.410	18.533.897	23.021.651	21.172.873	28.991.207
	e. Jumlah bagasi yang di muat	14.118.031	18.125.142	21.314.491	20.005.574	26.853.994

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2009-2013

*Data Prov.Kalimantan Timur termasuk Kaltara

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat 10 (sepuluh) pelabuhan umum yang terdiri dari empat pelabuhan dikelola oleh BUMN PT. Pelindo IV sedangkan sebelas Pelabuhan diselenggarakan oleh UPT. Departemen Perhubungan.

Sektor perhubungan udara merupakan transportasi unggulan dibandingkan transportasi lainnya. Adanya kemudahan akses transportasi udara mempengaruhi investasi ekonomi melalui peningkatan mobilisasi orang, barang dan jasa serta dukungan pengembangan pariwisata.

Saat ini, transportasi melalui udara sangat memegang peranan penting dalam sektor perhubungan. Banyaknya investasi berbagai sektor menjadi daya tarik ke Provinsi Kalimantan Timur misalnya sektor perminyakan, batubara dan lainnya, memerlukan dukungan layanan transportasi udara yang tinggi antar daerah asal dan tujuan terutama untuk tujuan Jakarta sebagai pusat sebagian besar perusahaan investor. Dengan demikian, fungsi transportasi udara untuk kegiatan penunjang pembangunan sangat vital.

Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 4 Bandar Udara yang dioperasikan dibawah pembinaan Departemen Perhubungan dan satu bandara dikelola oleh PT. Angkasa Pura.

Tabel 2.29
Bandar Udara Di Provinsi Kalimantan Timur

No	Nama Bandar Udara	Dimensi Landasan	Surface	Strength
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SEPINGGAN – BALIKPAPAN	2.500 x 45	Concrete	DC – 10 A – 320
2.	KALIMARAU – BERAU	2.250 x 45	Concrete	B.737 – 500 ER 900
3.	TEMINDUNG – SAMARINDA	1.050 x 30	Concrete	ATR 42
4.	MELAK	1.050 x 30	Concrete	ATR 42
5.	13 BANDARA PERINTIS	-	-	Clay/Grass/Gravel/Compact-esd Sand

Sumber: Dinas Perhubungan, 2013

Bandar udara yang paling potensial saat ini adalah Bandara Internasional Sepinggan-Balikpapan, dimana telah dilakukan pengembangan terminal penumpang menjadi 110.000 m² yang secara resmi beroperasi sejak 22 Maret 2014. Bandara Sepinggan menjadi pintu gerbang utama Provinsi Kalimantan Timur. Bandara Sepinggan telah memberangkatkan dan menurunkan penumpang paling banyak jika dibandingkan dengan bandara udara lainnya, bahkan pada tahun 2012 mencapai 92,92 persen kedatangan dan 92,52 persen keberangkatan penumpang dari total penerbangan di Provinsi Kalimantan Timur.

▪ Lingkungan Hidup

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup.

Tanpa disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan apalagi yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya alam jelas mengandung resiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya mengakibatkan dampak yang bersifat negatif maupun positif. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan selain berwawasan sosial dan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan dengan memperhatikan indikator seperti pada Tabel 2.30

Tabel 2.30
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1.	Persentase Penduduk berakses air minum	52,79	64,85	65,71	75,20		
2.	Penegakan hukum lingkungan	17	17	10	17	27	23
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (EQI)		68,63	62,22	70,75	74,07	74,07
4.	Emisi Gas Buang			5,04 juta CO2 eq	5,68 juta CO2 eq	6,41 juta CO2 eq	6,41 juta CO2 eq
5.	Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)			6,71	7,02	7,15	7,6
6.	Indeks kualitas udara		93,22	92,30	93,12	92,49	
7.	Indeks tutupan hutan		87,99	87,63	89,29	83,69	
8.	% Penanganan sampah				76,24%	77,5%	78,5%
9.	% Pembentukan BPBD		13,33%	33,33%	46,67%		
10.	Luas lahan hutan kota			141,0 Ha	196,9 Ha	211,9 Ha	211,9 Ha

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Beberapa prestasi membanggakan sebagai modal awal pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan telah di raih oleh insan Provinsi Kalimantan Timur. Prestasi tersebut adalah juara pertama “Kompetisi Usaha Energi Baru dan Terbarukan” pada 22 November 2011 serta penghargaan dari ASEAN Center for Energy di Kamboja untuk Pengembangan *Biogas Power Plant* di Desa Bukit Harapan, Kutai Timur sebagai runner up kategori Off Grid pada even “ASEAN Renewable Energy Project Competition 2012”.

▪ Kependudukan dan Catatan Sipil

Kependudukan dan catatan sipil Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.31
Aspek Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Belum	Belum	Sudah	Sudah	Sudah
2.	Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Kepemilikan KTP					1.121.148
4.	Kepemilikan Akte Kelahiran					1.119.104
5.	Banyaknya pernikahan	25.896	29.832	32.430	32.169	

Sumber : Biro Pemerintahan Umum Setda Prov. Kaltim

■ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah angkatan kerja perempuan di Provinsi Kalimantan Timur cenderung turun dimana pada tahun 2012 sebesar 524.978, begitu pula pada banyaknya pencari kerja perempuan yang terdaftar juga mengalami penurunan menjadi 30.448 di tahun 2012, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.32
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2012

No	Indikator	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Banyaknya pencari kerja perempuan yang terdaftar	28.734	39.491	17.766	36.731	30.448	24.632
2.	Angkatan kerja perempuan			520.431	533.828	524.978	476.458
3.	Persentase keterwakilan perempuan di legislative					20	68
4.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	1.855	2.561	2.528	2.907	2.856	2.860

Sumber : Kaltim Dalam Angka 2013

■ Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program keluarga berencana di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2013 hanya terdapat 324.293 peserta KB aktif. Demikian pula dengan rasio akseptor KB menurun pada tahun 2013 sebesar 56,42 %. Sedangkan Keluarga pra sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan menjadi 32.485 pada tahun 2013. Demikian pula pada keluarga sejahtera I yang meningkat pada tahun 2013 menjadi 80.366.

Tabel 2.33
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun		
		2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Banyaknya sarana keluarga berencana	391	391	476
2.	Banyaknya peserta KB active	366.904	385.128	324.293
3.	Rasio akseptor keluarga berencana	73,92	69,78	56,42
4.	Keluarga Pra Sejahtera	46.029	29.229	32.485
5.	Keluarga Sejahtera I	148.003	75.523	80.366

Sumber : BKKBN

▪ Sosial

Aspek sosial di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat kemajuannya pada tabel berikut ini :

Tabel 2.34
Aspek Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah keluarga fakir miskin yang menerima bimbingan mental, pelatihan keterampilan, UEP melalui KUBE	400	1.550	1.880	1.860	2.200
2.	Jumlah keluarga berumah tidak layak huni yang mendapat bantuan sosial	78	50	0	132	179
3.	Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sosial	130	140	12	30	170
4.	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	4.005	3.292	1.868	3.007	2.647
5.	Jumlah anak balita terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi			109	104	363
6.	Jumlah anak jalanan yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	295	100	138	129	210
7.	Jumlah wanita korban tindak kekerasan yang mendapatkan perlindungan sosial	30	44	69	414	377
8.	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial	300	730	465	1.120	1.125
9.	Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan bantuan sosial	340	404	591	494	740
10.	Penanganan korban bencana alam	312	226	326	555	279
11.	Jumlah warga KAT yang diberdayakan melalui pemukiman	30	90	219	77	114
12.	Banyaknya panti asuhan	125	144	134	134	134
13.	Banyaknya anak asuhan	3.722	8.248	7.299	7.938	7.368
14.	Banyaknya panti werdha	4	4	4	4	4
15.	Jumlah penghuni panti werdha	210	120	180	205	200

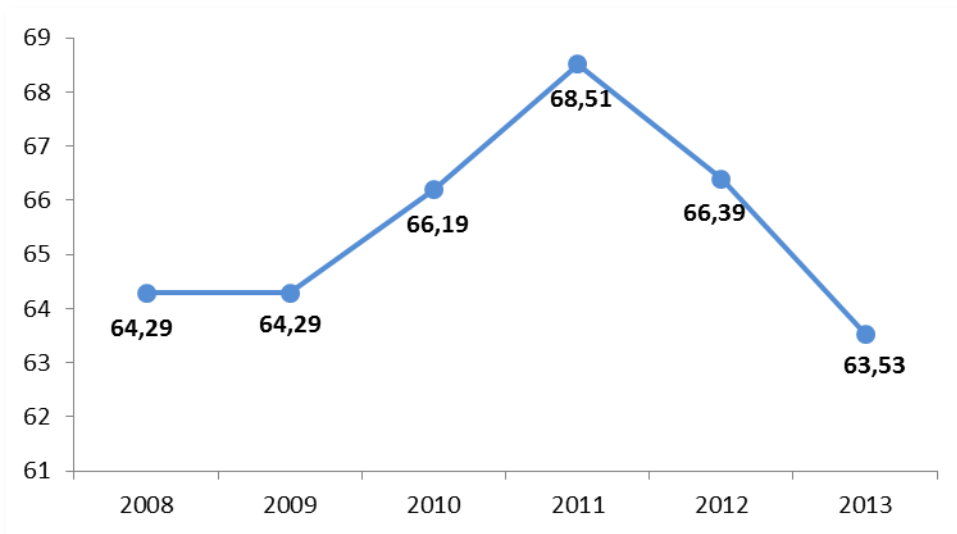
Sumber : Dinas Sosial Prov. Kaltim

▪ Ketenagakerjaan

Selama kurun waktu 2011-2012, angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Timur meningkat sebanyak 6.076 orang dari 1.511.529 orang menjadi 1.517.605 orang. Meskipun secara absolut naik, tetapi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 sebesar 66,39 persen atau mengalami penurunan sebesar 2,12 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Untuk kondisi Agustus 2013, jumlah

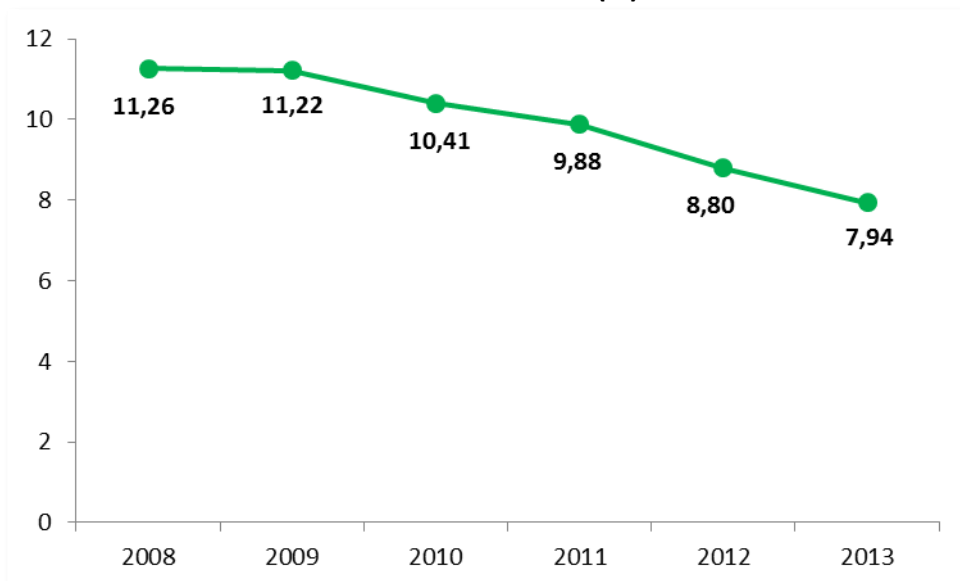
angkatan kerja Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1.497.572, sehingga TPAK Provinsi Kalimantan Timur sebesar 63,53 persen. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya dan bisa disebabkan penimbangnya yakni jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja.

Gambar 2.28
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008-2013(%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013

Gambar 2.29
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008-2013 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, kebijakan pemerintah terkait angkatan kerja memberi dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2013, pengangguran sebesar 7,94 persen dimana angka ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yang bahkan pada tahun 2008 pengangguran mencapai angka 11,26 persen.

Jika dirinci berdasarkan kabupaten/kota, maka tingkat pengangguran tahun 2013 paling tinggi berada di Kota Bontang yang mencapai 11,19 persen diikuti Paser sebesar 9,25 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terendah berada di Berau dengan pengangguran sebesar 5,85 persen dan Kutai Timur yang mencapai 6,09 persen.

Tabel 2.35
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (%)

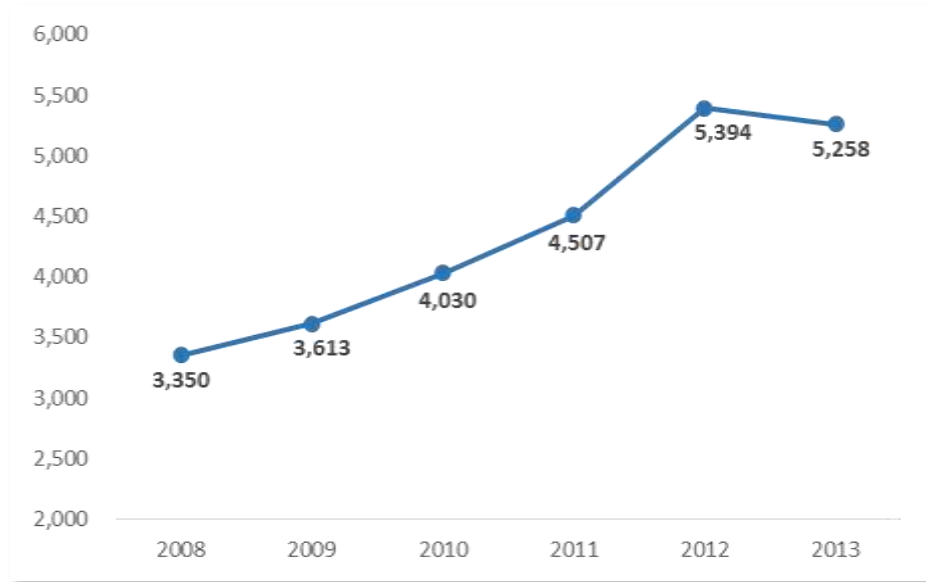
No.	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Paser	7,64	6,82	8,41	10,18	9,25
2.	Kutai Barat	7,37	7,97	9,11	8,23	8,03
3.	Mahakam Ulu					
4.	Kutai Kartanegara	11,38	11,53	7,68	7,89	7,37
5.	Kutai Timur	14,59	12,71	9,41	6,49	6,09
6.	Berau	9,37	9,33	8,21	5,79	5,85
7.	Penajam Pasir Utara	10,87	9,78	8,44	7,53	7,97
8.	Balikpapan	13,7	11,76	12,14	8,95	7,95
9.	Samarinda	10,19	9,22	10,9	9,71	8,57
10	Bontang	14,66	12,77	12,44	14,32	11,19
Kalimantan Timur		11,22	10,41	9,88	8,80	7,94

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013

▪ Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Perkembangan koperasi di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan trend yang positif dimana kenaikan terjadi di tiap tahunnya. Pada tahun 2008, jumlah koperasi di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3.350 unit dan terus berkembang hingga bertambah 5.394 unit pada tahun 2012 dan 5.258 unit pada tahun 2013.

Gambar 2.30
Jumlah Koperasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013



Sumber: Dinas Perindagkop Provinsi Kalimantan Timur

■ Penanaman Modal

Iklim investasi di Provinsi Kalimantan Timur ini dibagi menjadi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), berikut ini adalah data investasi daerah menurut Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 2.36
Realisasi Investasi Daerah (PMDN) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (Jutaan)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Paser	-	19.590	435.829,76	912.596,60	2.187.513,90
2. Kutai Barat	-	-	-	326.456,60	913.799,40
3. Mahakam Ulu					
4. Kukar	1.449.732,40	1.978.658	2.919.953,05	45.149,50	1.713.879,00
5. Kutim	-	1.027.850	1.250.904,26	4.390.650,60	3.522.274,80
6. Berau	-	270.654	876.411,63	1.279.420,90	386.842,30
7. Penajam Pasir Utara	31.300	25.950	8.644,00	3.111,00	3.811,0
8. Balikpapan	2.200	234.759,79	527.300,00	-	-
9. Samarinda	6.000	2.444.062,78	230.370,00	-	60.861,30
10. Bontang	11.283	471.712	8.220.305,15	651.094,30	858.769,90

Sumber: BPPMD Provinsi Kalimantan Timur

Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Kalimantan Timur memiliki progress yang cukup positif meski sering terjadi fluktuatif di setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2013, Provinsi Kalimantan Timur menduduki posisi kedua secara nasional sebagai wilayah yang memiliki investasi PMDN tertinggi.

Tabel 2.37
Realisasi Investasi Daerah (PMA) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2009-2013 (Jutaan)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Paser	5.800	1.936,34	3.548,15	26.093,90	422.087,04
2. Kutai Barat	-	65.809,43	103.236,08	142.024,70	200.549,47
3. Mahakam Ulu					
4. Kukar	25.708,67	68.559,95	62.531,90	133.854,00	860.900,26
5. Kutim	3.850	63.155,28	134.704,69	61.629,30	946.284,77
6. Berau	168.887,10	19.668,41	125.448,50	19.779,60	189.479,14
7. Penajam Pasir Utara	-	1.000,00	21,00	17.314,40	3.616,61
8. Balikpapan	47.063,67	505.286,12	3.200,10	1.547.616,00	7.854.905,28
9. Samarinda	1.540,16	9.874,43	66.276,70	40.859,20	400.479,55
10. Bontang	200,00	182.082,14	669.650,00	448.825,70	387,36

Sumber: BPPMD Provinsi Kalimantan Timur

■ Kebudayaan

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.38
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kalimantan Timur
Tahun 2008-2013

Tahun	Jumlah Penyelenggaraan
2008	32
2009	32
2010	32
2011	32
2012	32
2013	38

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Data Tanpa Kaltara)

Tabel 2.39
Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kalimantan Timur
Tahun 2008-2013

Tahun	Jumlah Sarana Penyelenggaraan
2008	13
2009	13
2010	15
2011	15
2012	17
2013	17

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Data Tanpa Kaltara)

Tabel 2.40
Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kalimantan Timur
Tahun 2008-2013

Tahun	Jumlah
2013	61

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Data Tanpa Kaltara)

▪ Kepemudaan dan Olahraga

Aspek kepemudaan di Kalimantan Timur terlihat mengalami kemajuan pesat, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah karang taruna dan jumlah organisasi yang terbentuk pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.41
Aspek Pemuda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2013

No	Indikator	Tahun		
		2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Banyaknya karang taruna	591	1.241	1.241
2.	Banyaknya organisasi sosial	173	173	173

Sumber : KDA 2013

Jumlah cabang olahraga, atlet dan sarana prasarana olahraga mengalami peningkatan pada tahun 2013, hal ini terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.42
Aspek Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

No	Cabang Olahraga	Jumlah Lembaga	Jenis Olahraga Unggulan	Jumlah Atlet	Sarana Prasarana Olahraga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bela diri	10	6	190	2
2.	Terukur	15	6	352	12
3.	Permainan	9	2	93	6
4.	Beregu	5	1	157	3
JUMLAH		39	15	792	23

Dispora Prov. Kaltim

▪ **Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Perkembangan aspek kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.43
Aspek Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	1	1	1	1	1
2.	Kegiatan Pembinaan politik daerah	4	4	4	4	4

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

▪ **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

Bidang pemerintahan umum menggunakan indikator indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi korupsi, opini BPK dan demokrasi dalam analisis untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, saat ini Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2012 dan mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2013. Sedangkan dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur juga memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

Indeks demokrasi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2009 menempati peringkat 8 secara nasional dan pada tahun berikutnya pada tahun 2010 menempati peringkat 4 nasional dengan angka indeks sebesar 73,04. Namun pada tahun 2011 terjadi penurunan tajam hingga hanya berada posisi 17 level nasional dengan indeks sebesar 66,37 meskipun angka tersebut masih berada di atas Indeks Demokrasi Indonesia (level nasional) yang hanya sebesar 65,48. Kondisi terakhir, Indeks Demokrasi Provinsi Kalimantan Timur kembali membaik dengan peningkatan nilai indeks menjadi 71,23 dan berada di posisi 8 level nasional.

Tabel 2.44
Jumlah Polisi Pamong Praja di Kalimantan Timur
Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah Pol PP
2009	88
2010	206

2011	1.397
2012	1.723
2013	2.141

Sumber : Satpol PP Prov. Kaltim

Tabel 2.45
Rasio Pamong Praja per 10.000 penduduk di Kalimantan Timur
Tahun 2009-2013

Tahun	Rasio
2009	0,33
2010	0,68
2011	4,44
2012	5,30
2013	6,54

Sumber : Satpol PP Prov. Kaltim

■ Ketahanan Pangan

Dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan cadangan pangan masyarakat serta mengurangi kemiskinan di pedesaan, telah dilaksanakan pengembangan Desa Mandiri Pangan pada tahun 2009 yang meliputi 21 Desa, dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 79 desa. Pembangunan Lumbung Pangan Desa dan Pengisian Lumbung juga telah dilaksanakan sejak tahun 2009 yang mencapai 10 unit dan menjadi 58 Unit pada tahun 2013 dengan alokasi anggaran dari APBN (DAK, TP dan Dekon dan APBD Provinsi, APBD Kab/Kota). Untuk pemberdayaan dan intervensi daerah rawan, serta untuk menjaga kestabilan tingkat harga pada saat panen raya, maka dilaksanakan pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) pada 29 kelompok usaha Gapoktan di 12 Kabupaten/Kota pada tahun 2008 dan tahun 2009 menjadi 52 kelompok serta dalam tahun 2010 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 54 kelompok. Keberadaan lembaga ini diharapkan akan mampu menjaga stabilitas harga pada saat panen, meningkatkan cadangan pangan masyarakat serta memperkuat modal untuk memperoleh posisi tawar yang tinggi dan nilai tambah. Namun jumlah lembaga ini masih sangat perlu ditingkatkan sehingga bisa mencakup semua kawasan sentra produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur.

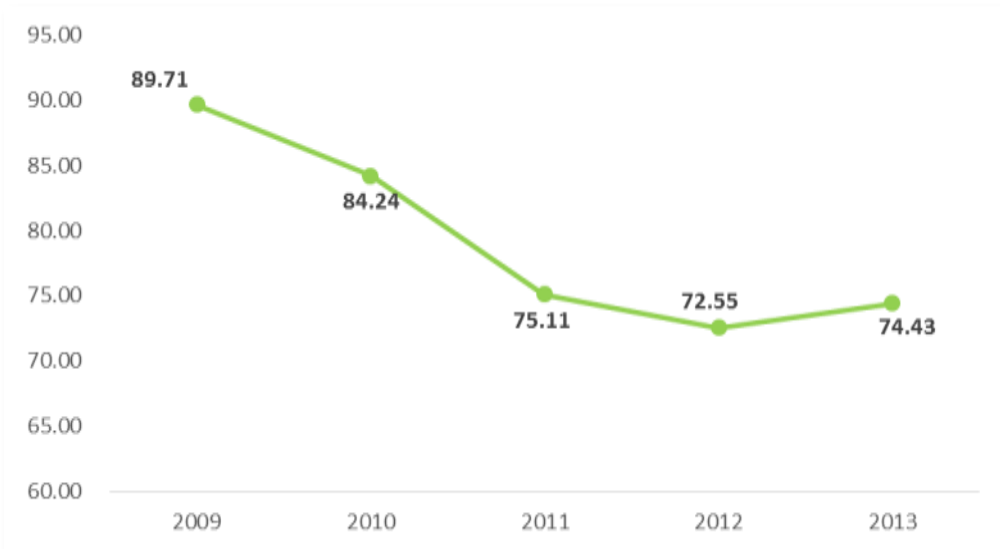
Capaian urusan ketahanan pangan diukur dengan indikator ketersediaan regulasi ketahanan pangan, ketersediaan pangan utama, dan skor Pola Pangan Harapan. Pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia setiap saat, baik kuantitas maupun kualitas, aman, bergizi dan terjangkau daya beli masyarakat. Kekurangan pangan tidak hanya dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, bahkan dapat mengancam keamanan sosial.

Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan merupakan rasio rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama (beras) per tahun (kg) dibagi dengan tingkat konsumsi. Ketersediaan pangan utama

pada tahun 2009 sebesar 89,71 dan pada tahun 2013 menurun menjadi sebesar 74,43 saja.

Gambar 2.31
Ketersediaan Pangan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (Kg)



Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur

▪ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa terus dilaksanakan dari tahun 2012 sampai tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.46
Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun 2012	Tahun 2013
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah kelompok tani, kelompok nelayan dan kelompok mikro kecil yang memanfaatkan teknologi tepat guna	140 lembaga	65 lembaga
2.	Jumlah lembaga perekonomian perdesaaan yang aktif	60 lembaga	60 lembaga
3.	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang telah dibina dan dilatih	281 lembaga	281 lembaga
4.	Jumlah desa/kelurahan yang berhasil meraih peringkat perlombaan	14 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan
5.	Persentase bantuan PNPM-MP yang tepat sasaran	100 %	100 %

Sumber : Renstra BPMPD

▪ **Statistik**

Tabel 2.47

Aspek Statistik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Buku Kaltim Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	PDRB Prov. Kaltim	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim

▪ **Kearsipan**

Tabel 2.48

Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kalimantan Timur

Tahun 2008-2013

Tahun	Rasio
2008	50%
2009	76,9%
2010	86,5%
2011	96,2%
2012	100%
2013	100%

Sumber : Badan Arsip Daerah Provinsi Kaltim

Tabel 2.49

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kalimantan Timur*)

Tahun 2008-2013

Tahun	Jumlah
2008	4
2009	8
2010	8
2011	10
2012	10
2013	10

Sumber : Badan Arsip Daerah Provinsi Kaltim

Keterangan : *) Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

▪ **Komunikasi dan Informatika**

Tabel 2.50

Aspek Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2012

No	Indikator	Tahun
----	-----------	-------

		2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah sarana telekomunikasi	416.263	-	397.544	448.433
2.	Banyaknya telepon umum	731	980	1.432	791
3.	Jumlah pelanggan telepon rumah	195.907	-	354.592	202.107
4.	Website Pemprov Kaltim	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Kaltim Dalam Angka, 2013

■ Perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat untuk mengakses informasi yang berisi kumpulan buku dan koleksinya baik yang tercetak maupun tersimpan secara digital. Perpustakaan juga menyediakan fasilitas umum untuk mengakses gudang data CD-Rom dan internet. Perpustakaan juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan dan rekreasi yang merupakan kebutuhan hakiki manusia.

Perkembangan perpustakaan di Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik terlihat dari jumlah perpustakaan yang meningkat sebesar 2.100 perpustakaan pada tahun 2013, walaupun terjadi penurunan pengunjung perpustakaan dilihat dari tahun 2010 -2012.

Tabel 2.51
Aspek Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2012

No	Indikator	Tahun				2013
		2009	2010	2011	2012	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan	171.144	197.953	255.676	199.571	172.040
2.	Jumlah peminjam buku	198.957	175.800	204.725	89.797	72.592
3.	Jumlah buku yang dipinjam	163.622	99.540	216.223	199.820	154.546
4.	Jumlah buku yang tersedia	216.060	226.322	242.738	252.007	256.819
5.	Jumlah perpustakaan di Kaltim	1.184	1.707	1.837	1.946	2.100

Sumber : Badan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur

2.3.2 Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

■ Pertanian

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi hingga saat ini belum dapat dicapai. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan baik pada lahan kering (ladang) maupun lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi hingga saat ini, agro-ekosistem sawah mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang. Sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan meskipun produksi

padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi, dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan. Produksi padi tahun 2013 sebesar 438.135 ton, penurunan 41.031 ton dari tahun 2008.

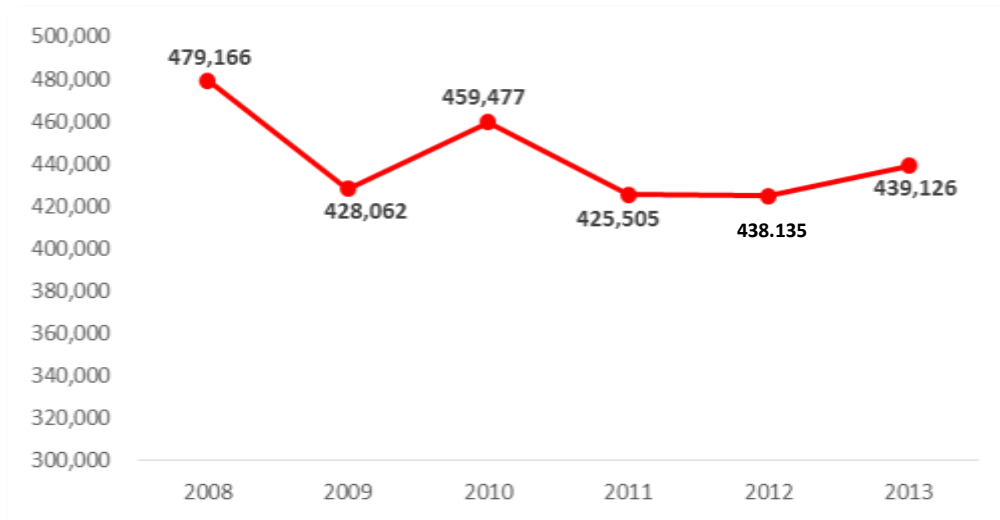
Tabel 2.52
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanian

No	Indikator	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Luas Panen Padi (Ha)	123.214	106.407	110.288	100.826	101.960	102.842
2.	Hasil per hektar padi (Kw)	47,56	52,21	41,66	42,20	41,65	42,58
3.	Produksi Padi (Ton)	479.166	428.062	459.477	425.505	424.670	438.135
4.	Luas Panen Palawija						
	a. Jagung	3.420	3.297	3.758	2.411	2.743	1.845
	b. Ubi Kayu	5.109	4.731	4.063	3.611	2.885	2.845
	c. Ubi Jalar	2.157	1.889	1.694	1.583	1.311	1.271
	d. Kacang Tanah	1.640	1.709	1.552	1.241	1.212	1.101
	e. Kedelai	1.661	1.456	1.420	1.187	723	963
	f. Kacang Hijau	718	769	654	577	423	381
5.	Hasil per Hektar Palawija						
	a. Jagung	37,42	37,97	26,74	25,71	25,83	22,93
	b. Ubi Kayu	227,48	176,29	179,28	184,27	191,81	196,92
	c. Ubi Jalar	96,77	96,05	99,71	98,28	99,48	104,91
	d. Kacang Tanah	15,03	11,44	12,36	12,40	12,67	13,13
	e. Kedelai	12,59	12,55	13,70	13,90	14,54	14,54
	f. Kacang Hijau	15,82	11,08	10,39	10,55	10,61	10,68
6.	Cakupan bina kelompok petani	-	-	-	6.169	6.169	6.169
7.	Kebutuhan Beras (ton beras)	294.196	99.374	42.219	356.431	370.047	384.183
8.	Pencetakan Sawah Baru (ha)	-	800	600	2.604	5.770	1.850

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan data produksi lima tahun terakhir diketahui bahwa, tingkat produksi padi di daerah ini masih cukup berfluktuasi. Kenyataan demikian menunjukkan bahwa pengelolaan produksi padi di daerah ini belum dikendalikan sepenuhnya oleh suatu sistem produksi yang terukur. Secara umum terdeteksi bahwa, faktor pembatas yang dominan adalah kondisi cuaca dan motivasi petani serta kualitas lahan dan sumber daya manusia berkualitas (teknologi modern). Pengaruh faktor cuaca, karena petani hanya mungkin menanam padi dengan baik bilamana curah hujan tersedia cukup. Motivasi petani naik dan turun dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama harga beras dan ketersediaan lapangan kerja alternatif. Sedangkan peran pemerintah dalam pengelolaan produksi adalah sebagai fasilitator dan dinamisor dari stakeholder yang ada.

Gambar 2.32
Produksi Padi Sawah + Ladang Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2013 (Ton)



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013 (Diolah)

Jika berdasarkan data produksi padi, jumlah penduduk, dan asumsi kebutuhan atau konsumsi beras per kapita sebesar 113 kg/tahun, status swasembada pangan (beras) di Provinsi Kalimantan Timur untuk lima tahun terakhir sudah tercapai. Meski begitu, trend memperlihatkan bahwa produksi beras di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan meskipun datanya fluktuatif.

Tabel 2.53
Status Swasembada Pangan Beras di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013

Parameter	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah penduduk (Jiwa)	2.603.505	2.649.344	3.028.487	3.145.579	3.250.125	3.275.800
Produksi Padi (Ton)	479.166	428.062	459.477	425.505	424.670	438.135
Rasio Produksi Padi per Satuan Penduduk (Kg/Thn)	184,05	161,57	151,72	135,27	130,66	133,75

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

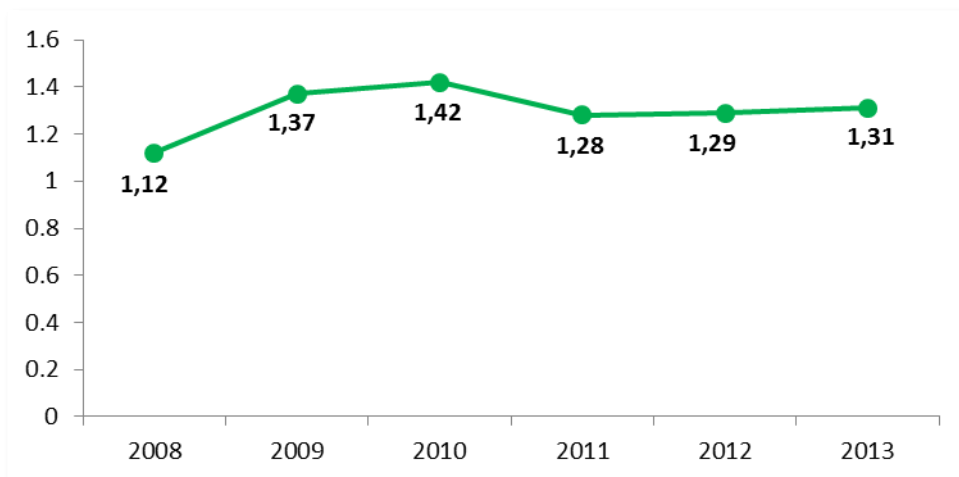
Prospek peningkatan produksi padi di daerah ini sesungguhnya sangat baik dan sejak tahun 2012 didukung oleh Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Bilamana program ini dilaksanakan secara konsisten dengan dukungan sumber daya secara

maksimal, maka upaya untuk mewujudkan swasembada beras di daerah ini akan dapat terwujud. Palawija sebagai sumber bahan pangan alternatif belum berkembang secara memadai, luas tanamnya cukup fluktuatif dan belum ada komoditas palawija yang luas panennya mencapai 10% dari luas panen tanaman padi.

Produksi palawija masih terbatas dan ubi kayu yang produksinya paling banyak belum mencapai 20% dari produksi padi. Meskipun, berdasarkan kriteria kebutuhan konsumsi per kapita untuk jagung, kedele dan ubi kayu telah mencapai swasembada. Tetapi berdasarkan kriteria penyediaannya, komoditi palawija masih mengalami kekurangan kecuali untuk ubi kayu.

Sektor pertanian dalam struktur perekonomian masih belum memberikan kontribusi yang signifikan. Hal itu perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena sektor ini mampu menampung banyak tenaga kerja dan lebih ramah lingkungan dibandingkan sektor pertambangan dan penggalian yang selama ini menjadi sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Timur. Terlebih lagi kontribusi sub sektor pertanian tanaman pangan yang merupakan pertanian bahan makanan, Provinsi Kalimantan Timur hanya sebesar 1,12 persen pada tahun 2008. Meski mengalami kenaikan, namun kenaikan pada sub sektor ini tidak terlalu signifikan dimana angka kontribusinya hanya mencapai 1,31 persen pada tahun 2013. Perlunya ada peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam lima tahun kedepan yang dibangun dari subsektor-subsektor penyusun sektor pertanian seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.

Gambar 2.33
Kontribusi Subsektor Pertanian Tanaman Pangan Terhadap PDRB
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2014
*Data Prov.Kalimantan Timur termasuk Kaltara

▪ Kehutanan

Kondisi sektor kehutanan terus mengalami peningkatan reboisasi dan rehabilitasi dari tahun 2008 sebesar 36.089,33 Ha menjadi sebesar 47.198,77 Ha pada tahun 2013 atau naik sekitar 11.109,44 Ha. Sedangkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)

cenderung mengalami penurunan dari tahun 2008 sampai tahun 2013. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya usaha izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin usaha pertambangan. Namun demikian kegiatan tersebut terus melakukan perbaikan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan hutan sehingga perkembangannya terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.54
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kehutanan Tahun 2008-2013 (Ha)

No	Indikator	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Reboisasi & Rehabilitasi Lahan Hutan*)	36.089,33	46.641,37	786,20	67.544.677	55.206.968	47.198.772
2.	Luas Hutan menurut TGHK						
	a. Hutan Lindung	1.698.171	1.698.171	1.698.171	1.698.171	1 761 455	1 761 455
	b. Hutan Suaka Alam dan Wisata	469.724	469.724	469.724	469.724	469.724	469.724
	c. Hutan Produksi Terbatas	3.249.132	3.249.132	3.249.132	3.249.132	2.924.389	2.924.389
	d. Hutan Produksi Tetap	3.121.900	3.121.900	3.121.900	3.121.900	3.573.516	3.573.516
	e. Hutan Pendidikan/Penelitian	24.581	24.581	24.581	24.581	24.581	24.581

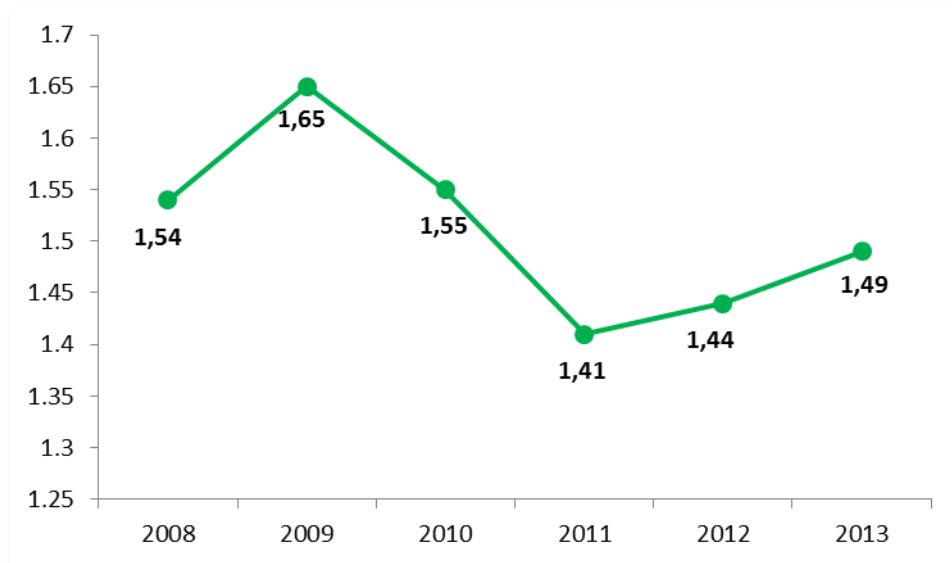
*) Termasuk Kaltara

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.

Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB diperhitungkan dari jumlah distribusi persentase total PDRB dari subsektor kehutanan. Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif namun jika dilihat secara umum maka terjadi penurunan. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi terbesar subsektor kehutanan terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 1,65 persen sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan kontribusi terendah yakni sebesar 1,41 persen. Sedangkan pada tahun 2012 kembali terjadi kenaikan kontribusi subsektor kehutanan menjadi 1,44 persen dan tahun 2013 juga mengalami hal yang sama menjadi 1,49 persen.

Gambar 2.34
Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap PDRB
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2014

*Data Prov.Kalimantan Timur termasuk Kaltara

■ Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor energi dan sumber daya mineral dapat memberikan kontribusi PDRB yang signifikan mengalami penurunan dari tahun 2007 sebesar 42,94 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi sebesar 42,91 persen. Sedangkan produksi batubara mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebesar 102,29 juta ton menjadi 172,44 juta ton pada tahun 2013 atau naik sebesar 68,58 persen.

Tabel 2.55
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007-2013

No	Indikator	Tahun						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kontribusi Pertambangan dan Penggalan thd PDRB*	42,94	46,06	45,81	47,43	50,00	47,12	42,91
2.	Produksi Batubara							
	a. PKP2B (juta)	102,29	104,24	118,29	136,41	149,11	157,51	172,44
	b. KP (juta)		18,62	12,43	42,04	58,96	73,52	56,67

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kaltim

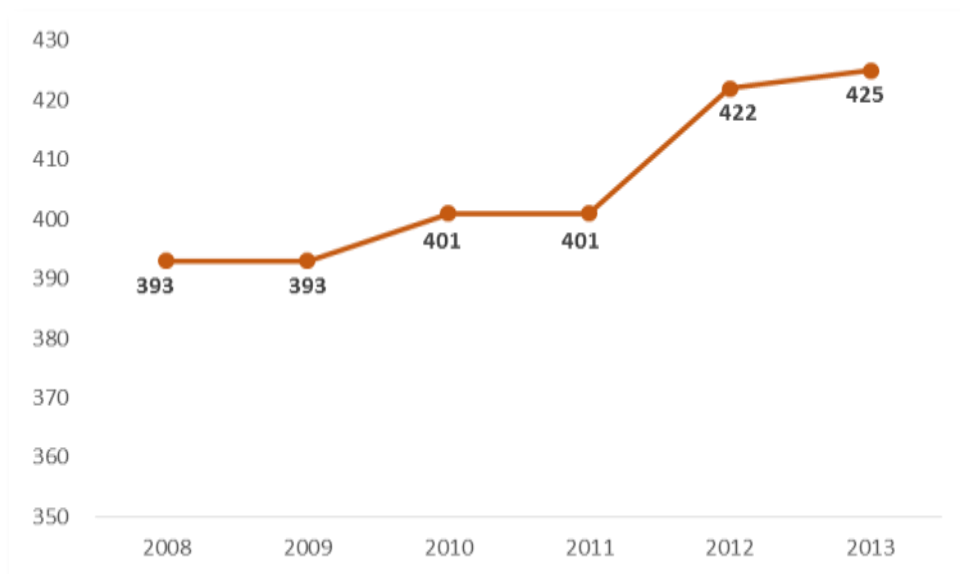
■ Pariwisata

Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi obyek wisata yang layak untuk diperhitungkan sebagai daya tarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat perkembangan obyek wisata di tiap tahunnya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, obyek wisata di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 425 obyek

wisata padahal enam tahun sebelumnya yakni tahun 2008 hanya memiliki 393 obyek wisata saja. Tentu saja hal ini berdampak pada kenaikan wisatawan (nusantara dan mancanegara) yang meningkat dalam enam tahun terakhir hingga pada tahun 2013 mencapai 1.061.389 wisatawan meskipun angka tersebut lebih rendah dari tahun 2012 yang mencapai angka 1.363.448 wisatawan.

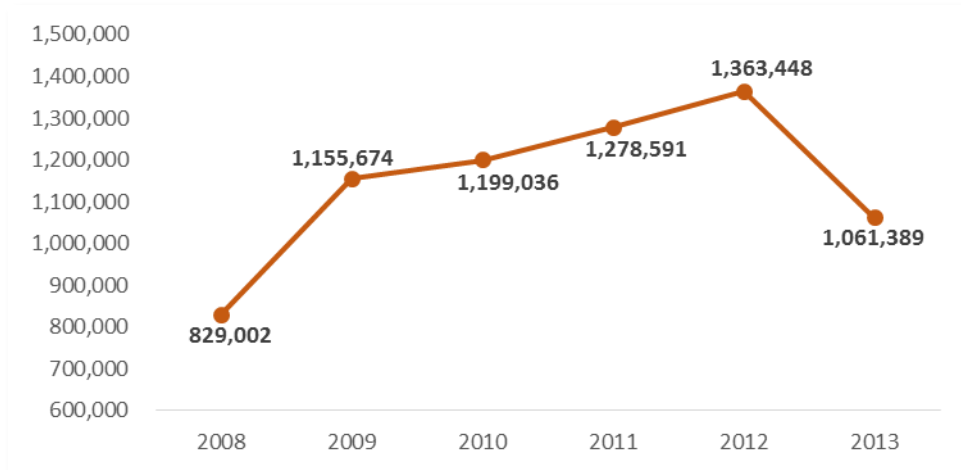
Jika dilihat peran jasa hiburan dan rekreasi pada pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur, dalam lima tahun terakhir ini tidak mengalami perubahan yakni sebesar 0,02 persen.

Gambar 2.35
Jumlah Obyek Wisata di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008-2013



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.36
Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara
Yang Datang di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

■ Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan data produksi lima tahun terakhir, diketahui bahwa tingkat produksi perikanan laut di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008-2013 secara umum mengalami fluktuatif kenaikan. Pada tahun 2008 produksi perikanan laut sebesar 92.175,2 ton dan mengalami penurunan pada tahun 2011 sampai tahun 2013. Sedangkan untuk produksi perikanan darat secara keseluruhan terlihat juga trend kenaikan yang stabil dari tahun 2008-2013.

Tabel 2.56
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013

No	Indikator	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Produksi Perikanan Laut (ton)	92.175,2	94.937,5	111.702,9	103.406,4	105.392,3	94.679,5
2.	Prod Perikanan Darat (ton)						
	a. Perairan umum	34.687,1	34.262,2	42.108,8	42.775,9	42.939,6	42.202,5
	b. Tambak	28.194,7	30.953,3	53.236,1	56.630,9	60.556,4	42.824,7
	c. Kolam	2.119,9	1.808,3	1.911,8	2.214,0	2.720,9	2.548,1
	d. Keramba	24.082,7	31.869,3	31.669,3	35.104,1	32.287,2	32.155,7
	e. Budidaya/pantai/laut	560,3	3.624,9	9.449,9	20.615,5	22.508,9	12.894,1
3.	Nilai Prod Perikanan Laut (000 Rp)	1412.013.938	1.716.044.492	1.974.875.550	2.007.410.601	2.074.523.300	2.019.488.345
4.	Nilai Prod Perikanan Darat (000 Rp)						
	a. Perairan Umum	592.616.970	714.925.590	758.344.280	632.201.200	645.738.500	601.416.550
	b. Tambak	1.015.400.862	894.020.979	2.594.498.443	1.731.002.460	1.837.312.341	1.766.860.401
	c. Kolam	46.599.645	40.171.765	42.393.781	55.100.267	72.564.779	64.982.366
	d. Keramba	504.118.360	621.769.210	730.151.450	814.804.732	696.940.867	667.316.385
	e. Budidaya pantai/laut	16.185.458	54.169.650	20.629.460	39.617.000	61.554.000	39.075.576
5.	Produksi Perikanan (laut + sungai)	166.537,4	182.076,5	225.167,5	227.420,9	232.528,9	211.386,4

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalimantan Timur

■ Perdagangan

Nilai perdagangan migas dan non migas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013 sebagai berikut :

Tabel 2.57
Aspek Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013

No	Indikator	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai ekspor Migas	17.025.364	9.290.597	11.319.283	18.655.697	14.999.647	12.843,54
2.	Nilai ekspor non migas	7.674.679	9.632.129	13.797.667	19.318.455	18.792.901	18.160,12
3.	Nilai impor migas	3.477.317	3.241.526	4.522.486	5.084.064	5.338.308	7.230,46
4.	Nilai impor non migas	1.755.532	1.643.277	1.746.524	2.132.674	2.805.232	2.281,64
5.	Surplus/Defisit	19.467.195	14.037.923	18.847.939	30.757.415	25.649.008	21.491.550

Sumber : BPS Prov. Kaltim

■ **Perindustrian**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus merencanakan dan menyiapkan sektor sekunder (hilir) yakni agro-industri yang relevan dengan sektor primer tersebut diatas sebagai basis sumber daya. Sektor tersier dengan sendirinya dibutuhkan (*multiflier effect*) untuk mendukung agro-bisnis sebagai kompetensi inti. Sehingga bagi Provinsi Kalimantan Timur kedepan, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan pembangunan harus fokus merealisasikan bagaimana sektor “agro-industri” benar-benar diwujudkan. Sebagaimana diketahui bahwa sektor industri dikategorikan dalam 3 (tiga bagian) yaitu:

- (1) Industri Besar;
- (2) Industri Menengah; dan
- (3) Industri Kecil

Tabel 2.58
Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2013

No	Indikator	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Perkembangan Industri :						
	a. Unit	8.075	8.628	8.876	9.097	9.260	9.424
	b. Tenaga Kerja	98.062	104.117	109.998	114.482	117.982	121.302
	c. Investasi (Juta Rupiah)	6.984.081	7.069.404	7.559.413	8.074.368	8.689.647	7.404.927
2.	Cakupan bina kelompok pengrajin	2.452	2.603	2.750	2.862	2.950	3.075

Sumber: Disperindagkop Prov. Kalimantan Timur, 2014

■ **Ketransmigrasian**

Jumlah transmigran swakarsa mandiri sebagai berikut :

Tabel 2.59
Aspek Ketransmigrasian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2012

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Transmigran swakarsa mandiri	786	1.555	1.535	118	-

Sumber : Kaltim Dalam Angka 2013 (termasuk Kaltara)

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia. Indikator yang menggambarkan aspek daya saing daerah dapat dilihat pada tabel 2.60.

Tabel 2.60
Indikator Aspek Daya Saing Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2012

ASPEK DAYA SAING	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)*	701.182	622.754	749.360	871.251	986.563	
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Makanan (Rp)*	354.525	308.309	363.367	403.719	450.920	
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)*	346.657	314.445	385.993	467.532	535.643	
Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan (%)*	50,56	49,51	48,49	46,34	45,71	
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)*	49,44	50,49	51,51	53,66	54,29	
Total Panjang Jalan (km)	8.259,46	9.208,43	11.138,92	11.298,49	11.652,83	3.121,75
Jumlah Kendaraan (unit)	1.108.307	1.266.493	1.455.583	1.672.919	1.869.377	
Rasio Total Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan	0,75	0,73	0,77	0,68	0,62	
Daya terpasang (MWh)	485,68	508,51	529,27	557,70	589,01	644
Daya mampu (MWh)	329,69	376,91	423,73	430,38	440,08	513

Beban Puncak (Mwh)	305,11	346,52	398,02	373,40	391,21	462
Banyak Pelanggan Listrik	1.645.561,82	1.843.053,99	2.086.708,03	2.261.0638,04	2.504.818,99	2.512.529

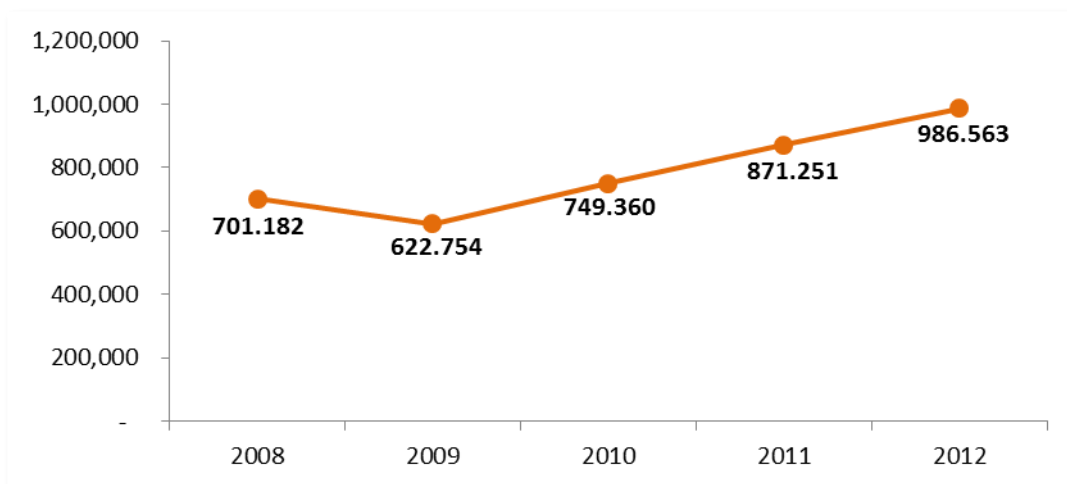
Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, BPS

*Data Prov.Kalimantan Timur termasuk Kaltara

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita yang pada tahun 2008 sebesar Rp 701.182,- dan menurun pada tahun berikutnya. Namun, rata-rata pengeluaran per kapita meningkat selama 4 tahun terakhir hingga pada tahun 2012 mencapai angka Rp. 986.563,-. Jika dilihat secara rinci berdasarkan kategori makanan dan non makanan maka pada tahun 2012, rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita (54,29%) lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan (45,71%). Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sudah lebih baik karena fokus konsumsi penduduk lebih tinggi ke konsumsi non makanan dibandingkan dengan konsumsi makanan.

Gambar 2.37
Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita/Bulan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2012



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013

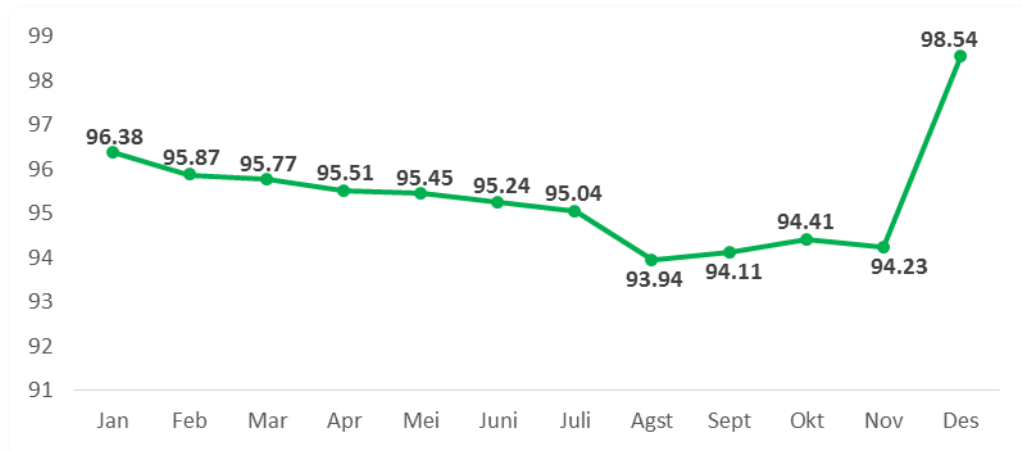
*Data Prov.Kalimantan Timur termasuk Kaltara

- **Pertanian**

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di wilayah pedesaan. Selain itu, NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi

maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Semakin tinggi NTPnya maka semakin kuat kemampuan/daya beli petani. Pada periode tahun 2013 dari bulan Januari hingga Desember, NTP Provinsi Kalimantan Timur berada di bawah nilai 100 yang berarti bahwa petani mengalami defisit/penurunan daya beli karena kenaikan penerimaan hasil produksi relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan harga input biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumahtangganya.

Gambar 2.38
Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2013
*Jan - Des (2013=100)

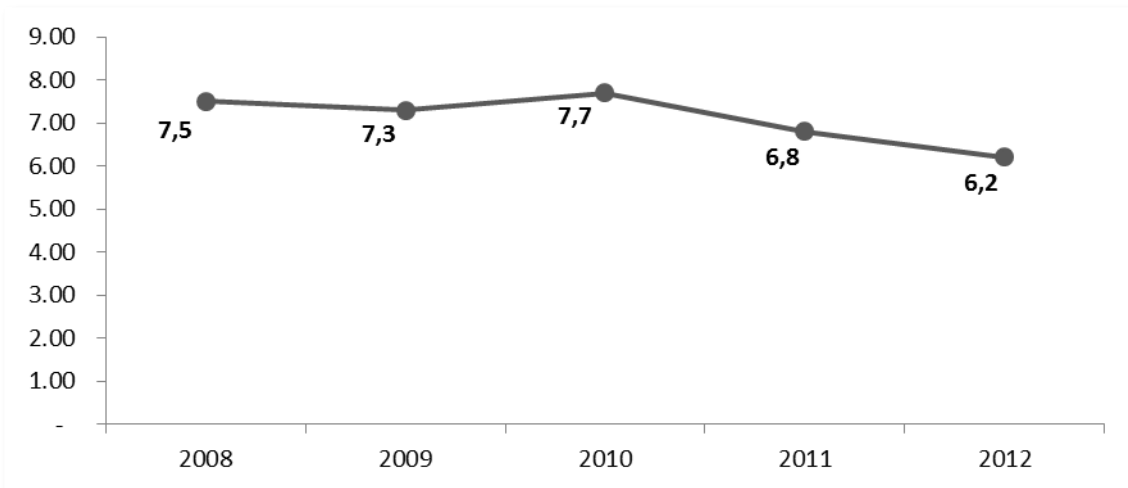
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1) Perhubungan

a. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Indikator ini dihitung dengan membagi panjang jalan dengan jumlah kendaraan sehingga dengan rasio ini dapat diketahui tingkat kepadatan kendaraan di jalan raya. Rasio pada tahun 2008 adalah 7,5 meter yang berarti setiap 7,5 meter jalan raya terdapat satu kendaraan bermotor. Angka rasio ini mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 6,2 meter yang berarti terjadi penambahan kepadatan kendaraan di jalan raya.

Gambar 2.39
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Prov. Kaltim Tahun 2008-2012 (m)

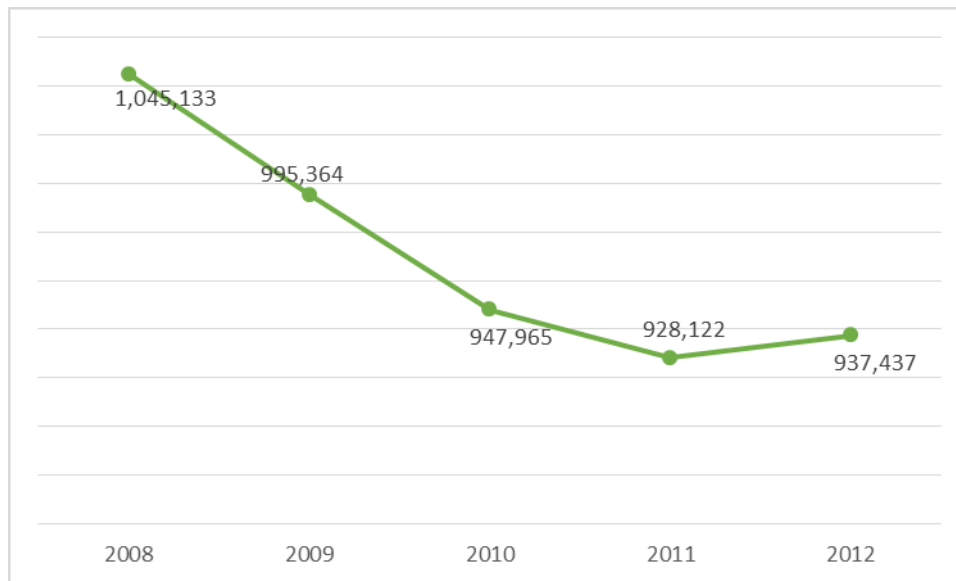


Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2009-2013 (data diolah)

b. Jumlah Pengguna Angkutan Umum

Jumlah orang yang menggunakan fasilitas angkutan umum di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan tiap tahunnya meski angkutan umum jumlahnya tetap. Penurunan disebabkan beralihnya pengguna kendaraan umum ke kendaraan pribadi.

Gambar 2.40
Jumlah Pengguna Angkutan Umum di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2007-2012



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur 2011

2) Penataan Ruang

Salah satu indikator penataan ruang di Provinsi Kalimantan Timur adalah luas wilayah kebanjiran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.61
Luas Wilayah Kebanjiran di Kalimantan Timur Tahun 2008-2013

Tahun	Rasio luas wilayah kebanjiran (%)
2008	17,72
2009	8,86
2010	7,86
2011	6,86
2012	4,86
2013	3,86

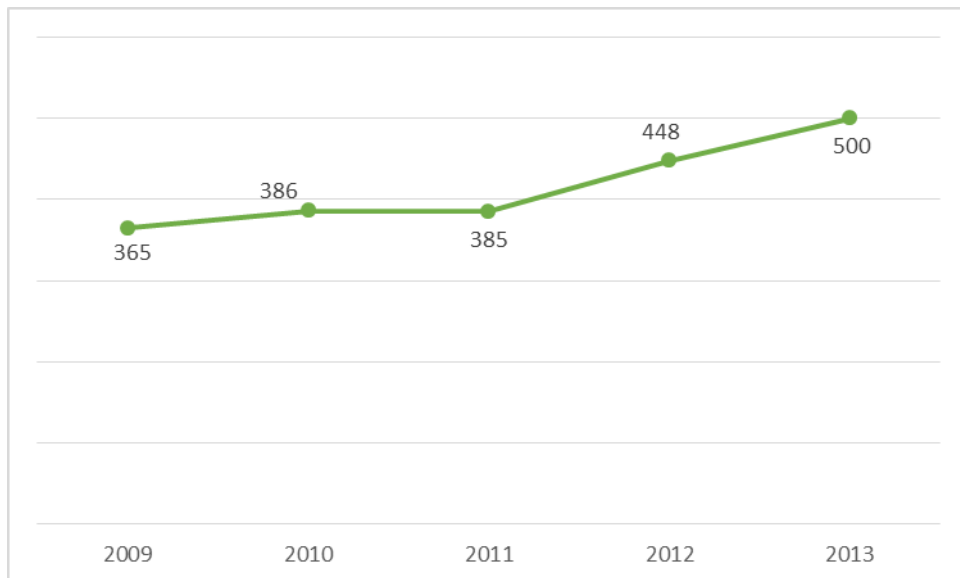
Sumber : Dinas PU, 2014

3) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Jumlah Bank

Pada tahun 2008, jumlah kantor bank di Provinsi Kalimantan Timur baik bank pemerintah, pembangunan daerah, swasta maupun asing berjumlah 292 unit dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 71,23 persen menjadi 500 unit.

Gambar 2.41
Jumlah Kantor Perbankan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008-2012



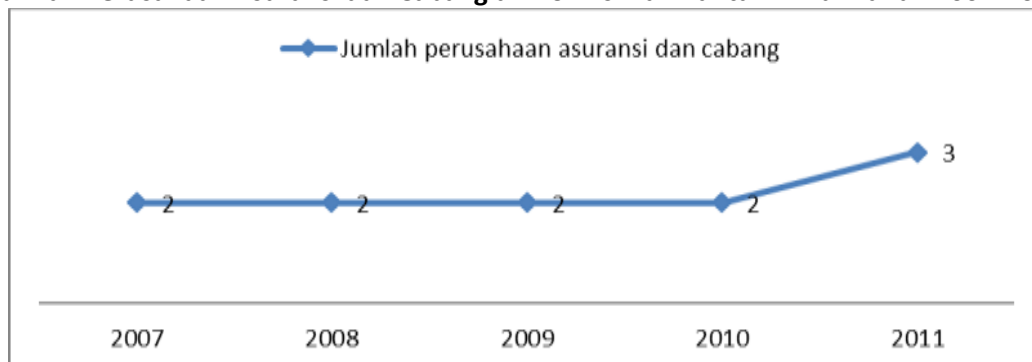
Sumber: Bank Indonesia Cabang Samarinda

b. Jumlah Perusahaan Asuransi

Jumlah perusahaan asuransi dan cabang di Provinsi Kalimantan Timur relatif tidak berkembang. Hal ini dapat berarti belum luasnya pangsa pasar asuransi di Kalimantan Timur sehingga investor belum tertarik menanamkan modalnya pada bisnis ini.

Gambar 2.42

Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007-2011



Sumber: Bagian Perekonomian Setda.Prov Kalimantan Timur 2011

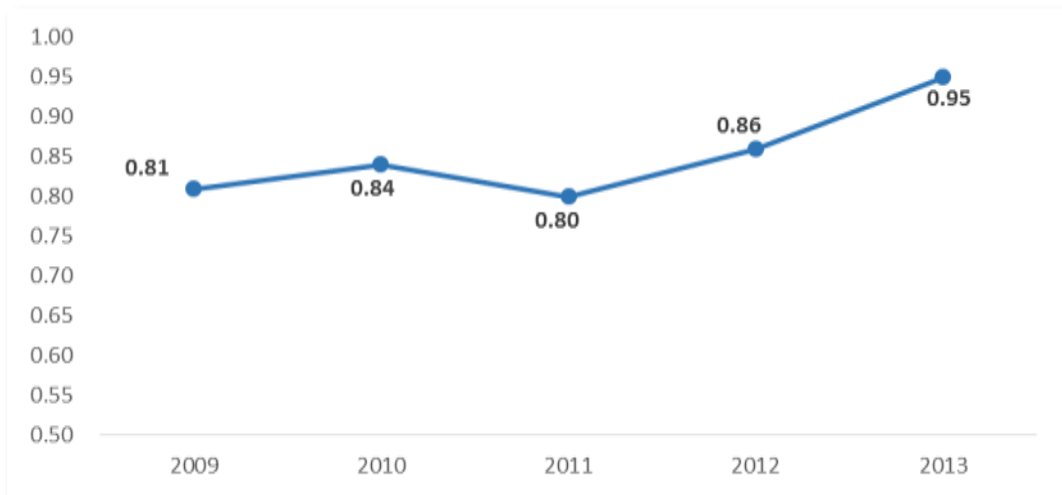
c. Jumlah Hotel dan Restoran

Jumlah hotel di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 sebanyak 404 buah, yang terdiri 51 hotel berbintang dan 353 hotel non bintang.

Restoran yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 sebanyak 790 restoran, namun terdapat restoran yang berkualitas dan layak dikunjungi wisatawan yang terdiri atas tujuh restoran piring emas, sembilan restoran piring perak, dan tiga belas restoran yang belum diklasifikasi.

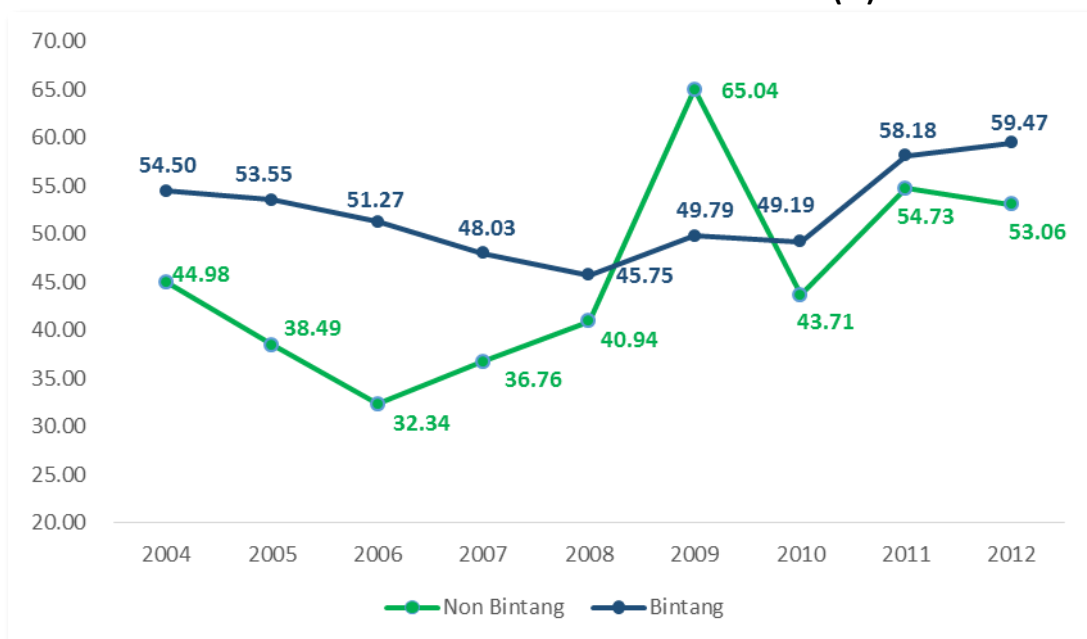
Gambar 2.43

**Distribusi Subsektor Hotel dan Restoran dalam Pembentukan PDRB
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 (%)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.44
Tingkat Hunian Hotel Bintang dan Non Bintang
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004-2012 (%)



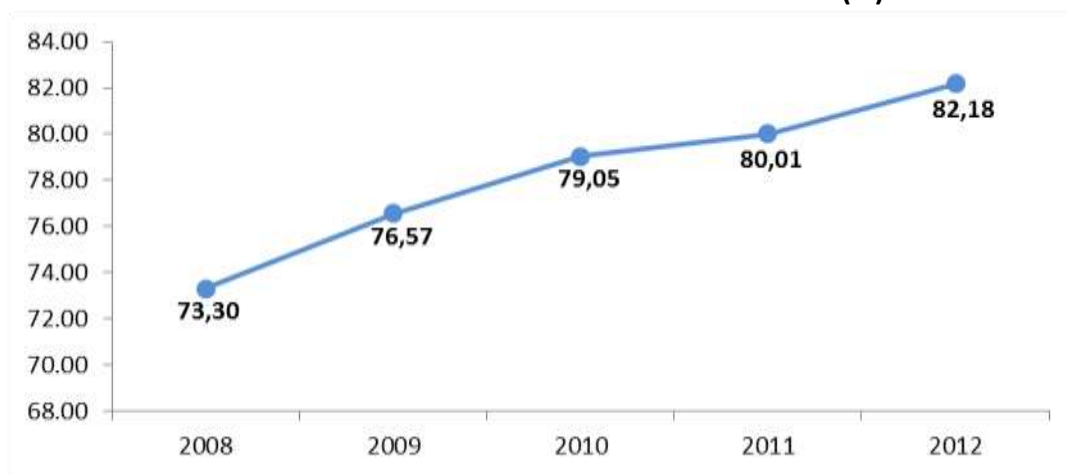
Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (*termasuk kaltara)

Tingkat hunian hotel baik bintang maupun non bintang di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif. Meskipun begitu, secara umum terjadi kenaikan tingkat hunian hotel baik hotel bintang maupun non bintang. Terlihat pula bahwa tingkat hunian hotel bintang selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan hotel non bintang kecuali pada tahun 2009. Kondisi terakhir, tingkat hunian hotel bintang pada tahun 2012 mencapai 59,47 persen sedangkan tingkat hunian hotel non bintang sebesar 53,06 persen.

4) Lingkungan Hidup

Aspek daya saing daerah fokus fasilitas wilayah/infrastruktur bidang lingkungan hidup diukur dengan indikator persentase rumah tangga dengan sumber air bersih. Pada tahun 2008 persentase rumah tangga dengan sumber air bersih sebesar 73,30 persen dan peningkatan persentase terjadi di setiap tahunnya hingga pada tahun 2012 mencapai 82,18 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Timur dengan sumber air bersih.

Gambar 2.45
Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Bersih
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2012 (%)



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2013

5) Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.62
Aspek Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2012

No	Indikator	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	406.143	408.307	467.701	527.202	601.687	663.582
2.	Banyaknya tenaga listrik rumah tangga yang terjual (MWh)	1.417.198	1.279.241	1.179.356	1.311.181	1.483.455	2.376.240

Sumber : Kaltim Dalam Angka 2013 (termasuk Kaltara)

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, situasi politik, keamanan hingga kemudahan perijinan dalam mendirikan maupun pengembangan usaha.

Suatu investor akan tertarik berinvestasi pada suatu daerah jika didukung dengan regulasi yang baik, regulasi tersebut diantaranya adalah adanya kemudahan perijinan serta pengenaan pajak dan retribusi daerah dengan tingkat biaya yang kompetitif. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi. Selain itu situasi yang kondusif bagi investasi juga perlu diperhatikan agar stabil.

Tabel 2.63
Aspek Iklim Investasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 20010-2012

No	Indikator	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah demo	11	12	15	35
2.	Pajak Daerah (dalam juta rupiah)	2.023,94	3.679,12	4.486,27	4.660,5
3.	Retribusi (dalam juta rupiah)	10,79	12,75	22,14	22,25

Sumber : Kaltim Dalam Angka 2013

2.5 EVALUASI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR 9 (SEMBILAN) STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal merupakan suatu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang mencakup urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Dengan adanya SPM akan memberikan informasi perkembangan pencapaian suatu pelayanan dasar dalam masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, dengan penerapan SPM akan mampu menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dengan mutu tertentu dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Capaian Pelayanan Minimal di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Realisasi Pencapaian Target Kinerja 9 (Sembilan) Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 - 2013

No	Bidang/jenis layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas waktu pencapaian	Realisasi Pencapaian Target				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Sosial								
1.1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial	Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	80	2015			4,91	20,00	23,69
		Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti sosial	60	2015			100,00	40,00	100,00
1.2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial	Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial	80	2015			100,00	20,00	100,00
		Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti	60	2015			100,00	40,00	100,00

1.3	Penanggulangan korban bencana	Bantuan sosial bagi korban bencana	80	2015			100,00	20,00	100,00
		Evaluasi korban bencana	80	2015			92,96	20,00	50,00
1.4	Pelaksanaan & pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik & mental serta lanjut usia tidak potensial	Penyelenggaraan jaminan sosial	40	2015			50,00	60,00	71,43
2. Lingkungan Hidup									
2.1	Pelayanan Informasi Status Mutu Air	Presentase Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan di informasikan status mutu airnya	80	2013		11,10	11,10	33,33	
2.2	Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan di informasikan mutu udara ambiennya	80	2013		57,14	57,14	92,86	
2.3	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Presentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	90	2013		100,00	100,00	81,82	85,70
3. Perumahan Rakyat									
3.1	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	2025			100,00	72,50	87,00
		Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	70	2025			100,00	100,00	36,00
3.2	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100	2025			100,00	17,44	17,44
4. Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan									
4.1	Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	2014				74,00	49,20
		Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat	100	2014				58,00	49,20
4.2	Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100	2014				74,00	62,30
4.3	Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	75	2014			0,50	4,30	

4.4	Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	80	2014				0,18	31,40
4.5	Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	50	2014				0,90	7,90
5	Ketenagakerjaan								
5.1	Pelayanan Pelatihan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	85	2016		79,06	76,00	76,02	65,58
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	90	2016		228,00	256,77	196,47	87,86
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	95	2016		100,00	93,08	67,65	92,73
5.2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	45	2016		28,07	6,48	8,64	14,22
5.3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	98	2016		3,57	1,67	4,11	85,01
5.4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	86	2016		81,27	123,47	55,36	86,26
5.5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran pemeriksaan perusahaan	40	2016		5,85	6,82	7,01	7,26
		Besaran pengujian peralatan di perusahaan	60	2016		60,79	69,16	57,96	8,94
6	Ketahanan Pangan								
6.1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Penguatan Cadangan Pangan	60	2015		0,00	0,00	30,00	45,00
6.2	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100	2015			98,15	70,00	85,00
6.3	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	2015		100,00	100,00	65,00	70,00
6.4	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60	2015		0,48	2,39	30,00	45,00
7	Kesenian								
7.1	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	Cakupan Kajian Seni (50%)	47	2014		40,00	33,33	33,33	46,67
		Cakupan Fasilitas Seni (30%)	29	2014		0,00	95,24	95,24	28,57
		Cakupan Gelar Seni (75%)	75	2014		66,67	100,00	100,00	75,00
		Misi Kesenian (100%)	100	2014		100,00	100,00	100,00	100,00
7.2	Sarana dan Prasarana	Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	50	2014		200,00	200,00	200,00	50,00
		Cakupan Tempat (100%)	50	2014		50,00	50,00	50,00	50,00
		Cakupan Organisasi	100	2014		294,12	294,12	294,12	100,00
8	Perhubungan								
8.1	Angkutan Jalan								

8.1.1	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi	100	2014				100,00	10,00
8.1.2	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek	100	2014				100,00	10,00
8.1.3	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	60	2014				60,00	100,00
8.1.4	Keselamatan	Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	100	2014				100,00	100,00
8.1.5	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan	100	2014				100,00	33,33
8.2	Angkutan Penyeberangan								
8.2.1	Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan	75	2014				75,00	80,00
8.2.2	Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	Tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan	75	2014				75,00	33,33
8.2.3	Keselamatan	Terpenuhi standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi	100	2014				58,82	100,00
8.2.4	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT	100	2014				-	50,00
8.3	Angkutan Laut								
8.3.1	Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan	100	2014				100,00	-
8.3.2	Jaringan Prasarana Angkutan Laut	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada lintas trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	100	2014				100,00	85,00

8.3.3	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi	100	2014				100,00	85,00
8.3.4	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal untuk angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100	2014				-	50,00
9 Penanaman Modal									
9.1	Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan Penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan daerah	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha pertahun :							
		• Nama Bidang Usaha (Jenis Bidang Usaha yang dilakukan)	100	2014				100	100
		• Lokasi Peluang Usaha (Tempatnya pelaksanaan Kegiatan Bidang Usaha)	100	2014				100	100
		• Ketersediaan Lahan (Ha)	100	2014				100	100
	Sektor bidang usaha unggulan adalah sektor/bidang usaha yang memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) di daerahnya.	Kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah (sudah sesuai atau belum dan alasannya)	100	2014				100	100
		Bentuk Dukungan pemerintah Daerah (Keuangan, Perijinan dll)	100	2014				100	100
	Informasi Peluang Usaha Mencakup : Lokasi, Ketersediaan lahan, Kesesuaian dengan tata ruang, daerah, bentuk dukungan pemerintah daerah, Potensi Pasar, Perkiraan Investasi	Potensi Pasar	100	2014				100	100
		Perkiraan Investasi (Perkiraan nilai (Rp) investasinya)	100	2014				95	95
9.2	Kerjasama Penanaman Modal Oleh PDPKM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah Provinsi dalam rangka kerjasama kemitraan:							
		Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Provinsi dengan pengusaha tingkat nasional	100	2014				100	100
		Jumlah UMKMK potensial yang akan dimitrakan di Provinsi	100	2014				100	100
		Jumlah Potensi Pengusaha Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Provinsi	100	2014				100	100
9.3	Promosi Penanaman Modal PDKPM adalah kegiatan yang ditujukan	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal tingkat Kabupaten.	100	2014				100	100

	untuk meningkatkan citra Indonesia dan Citra Kabupaten Kota secara khusus sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten/kota tersebut	Tindak Lanjut Kegiatan Hasil Promosi Penanaman Modal tingkat Provinsi Jenis kegiatan Promosi)	100	2014				100	100
9.4	Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotasesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDKPM di tingkat Kabupaten Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPPM / 6 X 100%	100	2014				100	100
		Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPPM / 6 X 100%							
		Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDPPM.	100	2014				100	100
		Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri	100	2014				100	100
		Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri	100	2014				100	100
		Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri	100	2014				100	100
9.6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal							
		Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE	100	2014				100	100
		Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri.	100	2014				100	100
		Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.	100	2014				100	100
		Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.	100	2014				100	100
		Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).	100	2014				100	100
9.7	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	100	2014				100	100